

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJiP) TAHUN 2023



DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota

Payakumbuh Tahun 2023 ini secara umum menggambarkan pencapaian kinerja instansi

dan sekaligus merupakan bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, serta sebagai salah satu wujud pelaksanaan

tugas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dan juga sebagai implementasi dari

ketentuan yang termuat dalam Inpres Nomor 7 tahun 1979 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan ini memuat beberapa aspek, Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 s/d 2026, capaian kinerja dan

beberapa kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam

pemecahan permasalahan. Berbagai informasi yang dimuat disajikan secara kuantitatif

maupun kualitatif, informasi ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja unit kerja

Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh beserta sub unit kerja Sekretariat dan

bidang-bidangnya sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam aspek-aspek apa saja

yang masih menjadi kendala sehingga pencapaian hasil kinerja di masa mendatang

dapat dioptimalkan.

Akhir kata, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat hendaknya dan sesuai

dengan harapan.

Payakumbuh,

Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KOTA PAYAKUMBUH

EDVIDEL ARDA, S.IP

DINAS KETAHANAN PA

NIP. 19700124 199003 1 001

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, hasil analisis capaian dari 5 (lima) indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026, ternyata telah menunjukkan kinerja yang baik.

Pada tahun 2023, target Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada setiap indikator kinerja dapat direalisasikan 100%, bahkan melebihi target. Sementara itu, realisasi kinerja tahun 2023 pada masing-masing indikator kinerja pada umumnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

Dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut, kinerja kegiatan-kegiatan dengan dana APBD yang dilaksanakan pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik.

DAFTAR ISI

KATA P	ENG	ANTAR
RINGKA	SAN	I EKSEKUTIFii
DAFTAF	RISI	iii
DAFTAF	R TA	BELiv
DAFTAF	R GA	MBARv
BAB I	PEN	NDAHULUAN
	A.	Latar Belakang
	В.	Maksud dan Tujuan
	C.	Tugas dan Fungsi
BAB II	PER	RENCANAAN KINERJA
	2.1	Perencanaan Strategis Sebelum Reviu
	2.2	Perencanaan Strategis Hasil Reviu
BAB III	AKI	JNTABILITAS KINERJA
	A.	Kerangka Pengukuran Kinerja
	В.	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis23
	C.	Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PEN	NUTUP
101		

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Perbandingan Ketersediaan Pangan Untuk diKonsumsi Penduduk	
Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2023	. 6
TABEL 2.1 Perjaniian Kinerja Hasil Reviu	. 14
TABEL2.2 Perjaniian Kinerja	15
TABEL 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	. 24
TABEL 3.2 Pencapaian Target Sasaran	. 25
TABEL 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 1	. 27
TABEL 3.4 Penyediaan Pangan berdasarkan pengelompokan jenis bahan makanan	28
TABEL 3.5 Penggunaan/pemakaian Pangan di Kota Payakumbuh	29
TABEL 3.6 Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi penduduk	31
TABEL3.7 Perbandingan ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh Tahun 2023	. 32
TABEL 3.8 Ketersediaan pangan utama di kota Payakumbuh	34
TABEL 3.9 Perbandingan capaian kinerja indikator ketersediaan pangan utama	35
TABEL 3.10 Analis Kebutuhan Sumber Daya	37
TABEL 3.11 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran	40
TABEL 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran 2	42
TABEL 3.13 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2023	45
TABEL 3.14 Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Konsumsi	47
TABEL 3.15 Konsumsi Pangan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2023	48
TABEL 3.16 Perkembangan Capaian Konsumsi Energi dan Protein	51
TABEL 3.17 Perbandingan capaian kinerja indicator Skor PPH Konsumsi	53
TABEL 3.18 Analisis Kebutuhan Sumber Daya	55
TABEL 3.19 Hasil Uji Residu Pestisida Sampel PSAT 23 Februari 2023 2023	58
TABEL 3.20 Hasil Uji Residu Pestisida Sampel PSAT 12 April 2023	61
TABEL 3.21 Hasil Uji Residu Pestisida Sampel PSAT 14 Maret 2023	63
TABEL 3.22 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan PanganPananan Pangan	65
TABEL 3.23 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan	65
TABEL 3.24 Analisis Kebutuhan Sumber Daya	67
TABEL 3.25 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja Sasaran Meningkatnya Pola	
Konsumsi Pangan Masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman	70
TABEL 3.26 Analisis Pencapaian Sasaran 3	72
TABEL 3.27 Gambaran gejolak harga bahan pangan pokok dan CV	75
TABEL 3.28 Gambaran gejolak harga cabe merah dan CV	77
TABEL 3.29 Gambaran gejolak harga bawang merah dan CV	79
TABEL 3.30 Perbandingan capaian kinerja indicator Stabilitas Harga	82
TABEL 3.31 Analisis Kebutuhan Sumber Daya	84
TABEL 3.32 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja Sasaran Meningkatnya	
Kelancaran distribusi pangan	86

TABEL 3.33 Analisis Pencapaian Sasaran 4	87
TABEL 3.34 Perbandingan capaian kinerja indicator Nilai Evaluasi	90
TABEL 3.35 Analisis Kebutuhan Sumber Daya	92
TABEL 3.36 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja Sasaran Meningkatnya	
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	94
TABEL 3.37 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023	96
TABEL 3.38 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran	98

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Perbandingan ketersediaaan pangan untuk diKonsumsi Penduduk	
Kota Payakumbuh Tahun 2018-2023	7
GAMBAR 3.2 Perkembangan Harga beras kualitas I di tingkat Konsumen	76
GAMBAR 3.3 Perkembangan Harga Cabe Merah di tingkat Konsumen	78
GAMBAR 3.4 Perkembangan Harga Bawang Merah di Tingkat Konsumen	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman Kepemerintahan yang baik (Good Governance) mulai mengemuka seiring setelah munculnya krisis multidimensi di negeri ini dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara baik. Untuk mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut tentunya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena untuk membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki institusi pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat. Koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Tugas dan Fungsi

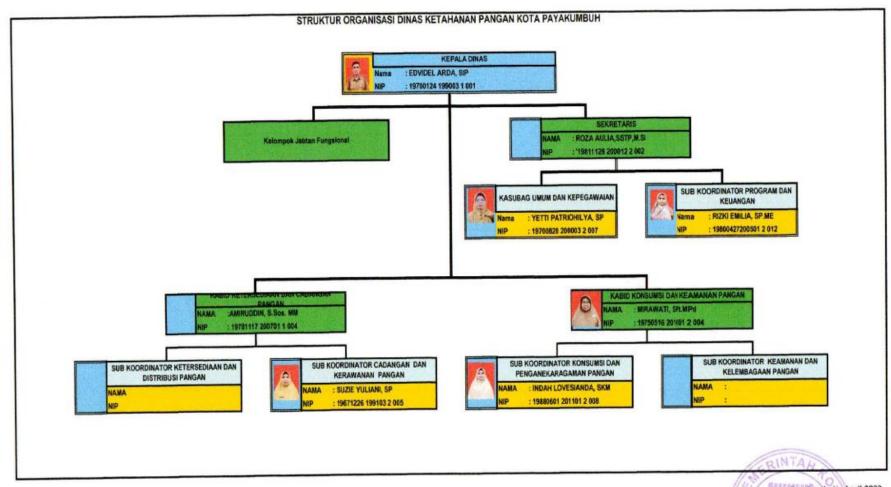
1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dibentuk dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2016 yang kemudian diperbaharui dengan Perwako Nomor 53 Tahun 2021 adalah :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan membawahi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Cadangan dan Kerawanan Pangan.

- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kemanan dan Kelembagaan Pangan.
- e. UPTD.

(Untuk lebih jelasnya terlampirStruktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh)



Payakumbuh, April 2023 Kepala Dinas Ketahanan Pangan

NIP: 19700124 199003 1 001

2. Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan, melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, memantau dan melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, melaksanakan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya serta melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.

Adapun tugas pokok Kepala Dinas sebagai berikut:

Membantu Walikota dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan pelayanan pemerintah dibidang ketahanan pangan, melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

- Pelayanan teknis dan administrasi terhadap semua urusan dilingkungan ketahanan pangan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang ketahanan pangan.
- Koordinasi perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketahanan pangan.
- Koordinasi perumusan kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah serta masyarakat.
- Koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pemantauan ketahanan pangan, distribusi dan harga pangan, strategi serta penganekaragaman konsumsi pangan.

- Koordinasi perumusan kebijakan kewasapadaan pangan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gejala rawan pangan, keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi.
- Pengorganisasian perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas dengan prinsip-prinsip pelayanan prima yang terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Aspek-aspek Strategis Organisasi

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu daerah baik yang berasal dari produk sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi konsumsi pangan yang didefenisikan sebagai jumlah yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat, baik dalam saat normal maupun saat terjadinya bencana. Ketersediaan untuk konsumsi pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1
Perbandingan Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk
Kota Payakumbuh Tahun 2018-2023

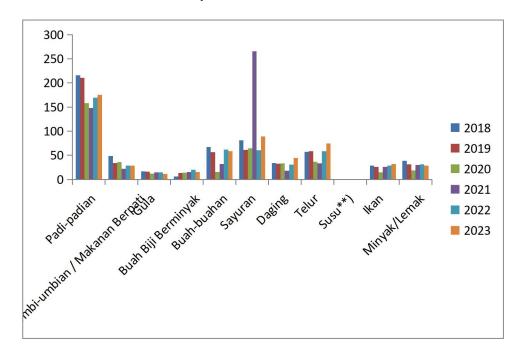
No.	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Pangan (Kg/Kap/Tahun)*) han						
	rungan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padi-padian	215,68	210,30	158,17	147,88	169,44	175,16	
2	Umbi-umbian / Makanan Berpati	48,79	34,25	35,77	21,96	28,48	28,50	
3	Gula	16,77	15,95	12,19	15,1	15,10	11,40	
4	Buah Biji Berminyak	6,17	13,68	14,21	15,33	19,83	15,43	
5	Buah-buahan	67,43	56,86	15,60	31,82	61,87	58,54	
6	Sayuran	81,35	61,45	64,56	265,46	60,28	89,09	
7	Daging	34,04	32,46	33,16	18,28	31,00	44,67	
8	Telur	57,23	58,47	36,58	33,63	58,69	74,78	
9	Susu**)	0,00	0,11	0,04	0,04	0,04	0,16	

11	Minyak/Lemak	38,45 594,59	31,44 541,04	18,84 403,62	30,17 606,01	31,13 504,53	28,63 558,46
11	Minyak/Lemak	,	,	-,-	,	, -	,
10	Ikan	28,69	26,05	14,52	26,34	28,67	32,12

Sumber: Data diolah DKP, 2023

Jika di tuangkan dalam gambar, maka Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi Penduduk Payakumbuh Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.1
Perbandingan Ketersediaan Pangan (gr/kap/tahun)
untuk Dikonsumsi Penduduk
Kota Payakumbuh Tahun 2018- 2023



Sumber: Data diolah DKP, 2023

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata ketersediaan pangan Tahun 2023 adalah 558,46 kg/kap/tahun, jika dibandingkan pada Tahun 2022 dengan rata-rata sebesar 504,53 kg/kap/tahun, terjadi kenaikan sebesar 53,93kg/ka/thn. Kenaikan ketersedian pangan di Kota Payakumbuh dibandingkan tahun sebelumnya tidak terjadi terlalu besar. Kenaikan terjadi pada kelompok padi-padian, umbi-umbian, sayuran, daging, telur, susu dan ikan.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada: a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kota Payakumbuh dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

b. Distribusi dan Harga Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien, sebagai persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menurut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan, sehingga pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah. Kinerja subsistem distribusi dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen dan sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu, masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil diantara pelakunya.

Selanjutnya alur distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen terlihat melalui beberapa tingkatan pelaku distribusi. Pada setiap tingkatan pelaku distribusi tersebut memberikan marjin keuntungan, sehingga semakin banyak tingkatan pelaku distribusi tersebut akan berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan. Beban tersebut akan diteruskan kepada konsumen yang berakibat terhadap tingginya harga pangan.

Selain itu, distribusi pangan antar wilayah belum dapat dilihat secara cermat dan akurat pada saat ini. Diperlukan pemantauan arus masuk dan keluar pangan melalui pos-pos penjagaan TPR oleh Dinas Perhubungan dan pendirian pos-pos pangan di daerah perbatasan dengan kabupaten tetangga.

Sebagaimana dijelaskan diatas, arus distribusi pangan akan berdampak terhadap harga bahan pangan dan akan menentukan keterjangkauan rumah tangga terhadap bahan pangan. Perubahan dan fluktuasi harga pangan dapat terjadi sewaktu-waktu karena berbagai faktor seperti terjadinya panen raya, hari besar agama, gagal panen, terganggunya arus distribusi dan sebagainya.

Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi. Sedangkan bagi pemerintah diperlukan untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu dengan melakukan operasi pasar. Dengan demikian, diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke produsen dan pemerintah tepat waktu. Pada saat ini, informasi harga tersebut sampai ke produsen baru melalui pedagang-pedagang pengumpul/ pedagang besar, sehingga harga sudah terlebih dahulu naik di tingkat konsumen baru diikuti di tingkat produsen.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang mudah dan murah; b) Penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis akses harga pangan masyarakat; c) Distribusi pangan

masyarakat; dan d) Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pengembangan lembaga pemerintah daerah.

c. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Konsumsi energi rata-rata perkapita perhari masyarakat Kota Payakumbuh adalah 2.021,8 kkalori/kapita/hari, sedangkan angka kecukupan energi (AKE) adalah sebesar 2.100 kkalori/kapita/hari. Data tersebut menunjukkan bahwa kuantitas konsumsi pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 berada dalam kategori tahan pangan. Artinya jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi kecukupan energi (90-119.9% AKE).

Untuk konsumsi protein, Angka kecukupan protein yang dianjurkan berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 adalah sebesar 57 gram/kapita/hari. Sedangkan konsumsi protein di Kota Payakumbuh sebesar 65.2 gram/kapita/hari. Konsumsi protein di Kota Payakumbuh sudah melebihi konsumsi protein yang dianjurkan. Konsumsi protein meliputi protein nabati dan protein hewani, dimana sumber protein hewani yaitu kelompok pangan hewani dan protein nabati adalah kelompok pangan kacang-kacangan.

Pangan segar yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat dapat berasal dari produksi dalam negeri dan dapat berasal dari pemasukan luar negeri atau impor. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang tidak akan berarti, jika makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak aman dari cemaran. Cemaran adalah unsur lain yang ditemukan dalam pangan. Pangan menjadi tidak aman karena tercemar atau terkontaminasi oleh cemaran fisik, cemaran kimia dan cemaran biologis. Cemaran fisik diantaranya adalah kerikil, pecahan kaca, rambut, kuku dan logam. Cemaran kimia contohnya adalah residu pestisida, aflatoksin, logam berat dan bahan kimia berbahaya. Untuk cemaran biologis diantaranya adalah bakteri, jamur, virus dan cacing.

Keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Mewujudkan keamanan pangan segar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang rantai pangan, mulai dari budidaya, panen, pascapanen, distrbusi, retail, hingga pangan siap dikonsumsi.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki mempunyai tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada: a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan, b) Penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan, dan c) Pembinaan untuk pengembangan kelembagaan dalam diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan.

BABII

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Pada periode Tahun 2017-2022, dokumen perencanaan di Dinas Ketahanan Pangan mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh juga melakukan perubahan yang disesuaikan dengan perubahan sasaran dan indikator pada urusan pangan.

Pada Rencana Strategis periode 2017-2022 telah dilakukan perubahan karena diberlakukannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian terjadi perubahan pada Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, berikut turunannya yaitu Renstra Dinas.

Sehubungan dengan itu, maka dilakukanlah reviu internal terhadap dokumen Renstra Dinas antara lain :

- 1. Target Indikator Kinerja Utama disesuaikan kembali dengan melihat capaian kinerja selama ini serta pertimbangan teknis lainnya.
- 2. Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019

Berdasarkan hasil reviu dan ditindaklanjuti dengan Rancangan Awal Perubahan Resntra Dinas yang telah disepekati dengan Bappeda sesuai dengan Berita Acara Pembahasan dan Verifikasi Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 Tanggal 1 Oktober 2020 adalah sebagai berikut :

1. Target Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Target Awal / Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	AlasanPerubahan
1	Skor PPH Ketersediaan	94	88,5	Dari 9 kelompok bahan pangan yang ada, salah satu kelompok bahan pangan (kelompok kacang-kacangan) sulit mencapai target dikarenakan tidak ada didukung data produksi
2.	Skor PPH Konsumsi	90,5	84	Perubahan Target Indikator Sasaran karena merubah prilaku masyarakat dalam hal konsumsi protein, buah, sayuran memerlukan jangka waktu yang lebih lama, ini dapat kita lakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi B2SA secara terus menerus dan berkesinambungan
	Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi	Tinggi	
3.	Stabilitas Harga - Beras - Cabe - Bawang	≤10% ≤25% ≤10%	≤10% ≤25% ≤25%	bawang sebagaimana komoditas sayuran laiinya seperti cabe merupakan komoditas yang mudah rusak, sehingga fluktuasi harga untuk komoditas sayuran adalah 25%
	Stabilitas Pasokan	≥77%	≥77%	
4.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	А	А	

Sumber: DKP, 2020

2. Program dan Kegiatan

Telah dilakukan penyesuaian Program dan Kegiatan dengan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 dengan melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan tersebut. Akan tetapi pelaksanaannya dimulai untuk Tahun 2021. Untuk Tahun 2020 tetap mengacu kepada Program dan Kegiatan yang lama.

B. Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis Dinas juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Berdasarkan hasil reviu Indikator Kinerja Utama tidak mengalami perubahan, hanya target saja yang mengalami perubahan.

C. Perjanjian Kinerja Sebelum Reviu

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang mengalami revisi terhadap target, maka diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan	89
2.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2	Skor PPH Konsumsi	85
		3	Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi
3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	4	Stabilitas Harga - Beras - Cabe - Bawang	≤10% ≤25% ≤25%
		5	Stabilitas Pasokan	≥77%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	6	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	А

Sumber: DKP, 2023

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.721.591.837,-	APBD Kota
2	Peningkatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	754.103.338,-	APBD Kota
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	29.180.070,-	APBD Kota
4	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	25.639.234,-	APBD Kota
	TOTAL	Rp.	3.530.514.479,-	APBD Kota

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Pada periode Tahun 2023-2026, dokumen perencanaan di Dinas Ketahanan Pangan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh juga melakukan perubahan yang disesuaikan dengan perubahan sasaran dan indikator pada urusan pangan.

Pada Rencana Strategis periode 2023-2026 telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah:

" Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh"

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan selaras dengan Tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu :

- 1. Terwujudnya Pembangunan Manusia Yang Berkualitas
- 2. Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

2. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetap kan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan
- b. Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman
- c. Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan selaras dengan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu :

- 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 2. Menurunya tingkat kemiskinan dan pengangguran

3. Indikator Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasa		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
			ran		2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatn ya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh		Indeks Ketahanan Pangan	81,73	84	84,1	84,2	84,3
2.		Meningk atnya ketersedi aan pangan	Ketersediaa n pangan utama	22.571 ton	19. 735 ton	19.745 ton	19.755 ton	19.765 ton
3.		Meningk atnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimban g dan aman	Skor PPH Konsumsi	85,09	85,10	85,20	85,30	85,40

		Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi	Tinggi	tinggi	tinggi	Tinggi
4.	Meningk atnya kelancar an distribusi pangan	Stablilitas Harga					
		beras	2,95%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
		cabe	32,74%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%
		bawang	16,64%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%

Sumber: DKP, 2023

3. Program dan Kegiatan

Telah dilakukan penyesuaian Program dan Kegiatan dengan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 dengan melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan tersebut serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT 2023-2026 sebagai berikut :

No.	Indikator	Capaian Tahun	Target Capaian Setiap tahun					
No.	murkator	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1.	Ketersediaan pangan utama	22.571 ton	19. 735 ton	19.745 ton	19.755 ton	19.765 ton		
2.	Skor PPH Konsumsi	85,09	85,10	85,20	85,30	85,40		
3.	Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		
4.	Stablilitas Harga							
	Beras	2,95%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%		
	Cabe	32,74%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%		
	Bawang	16,64%	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%		

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, maka diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	1	Ketersediaan pangan utama	19.735 ton
2.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2	Skor PPH Konsumsi	85,10
		3	Tingkat Keamanan Pangan	Tinggi
3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	4	Stabilitas Harga - Beras - Cabe - Bawang	≤10% ≤25% ≤25%
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	6	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	А

Sumber: DKP, 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026, maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Nomor : 520.11/SK/DKP-PYK/II/2023, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
 Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
 Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
 Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Nomor: 520.11/SK/DKP-PYK/II/2023 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujua dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh periode Tahun 2023-2026, dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
					%
1	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	19.735	22.662	114,83
2	Skor PPH Konsumsi	Nilai	85,10	87,3	102,58
3	Tingkat Keamanan pangan	Level	Tinggi	Tinggi	100,00
4	Stabilitas Harga				
	a. Beras	%	≤10	3,93	160,7
	b. Cabe	%	≤25	18,68	125,28
	c. Bawang	%	≤25	15,87	136,52
6	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	А	В	86,37

Sumber: DKP, 2023

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Ketersediaan Pangan Utama dengan capaian kinerja 114,83 %, Skor PPH Konsumsi dengan capaian sebesar 102,58%, Stabilitas Harga Beras 160,7%, Stabilitas Harga Cabe sebesar 125,28% dan Stabilitas harga Bawang sebesar 136,52%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Tingkat Keamanan Pangan, dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan capaian kinerja yang kurang dari target / tidak tercapai ditunjukkan pada indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat sebesar 86,37%.

Adapun pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran diatas, dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Target Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2023

					Tingkat	Pencapaia	n	
No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	1	1	114, 83				
2	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2	1	102, 58	1	100		
3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	1	1	140, 83				

Sumber: DKP, 2023

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 4indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan pangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya ketersediaan pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan		n Tahun 222	%	Capaian 202		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap akhir renstra
	Killerju		Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi			r.c.istru	(%)
1	Ketersediaan Pangan Utama	%	19.725	22.571	114,42	19.735	22.662	114, 83	Sangat baik	19.765	114,65

Sumber : DKP, 2023

Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dilihat dari indikator : ketersediaan pangan utama.

Capaian kinerja nyata indikator ketersediaan pangan utama adalah sebesar 22.662 ton dari target sebesar 19.735 ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114,83 % dengan kategori sangat baik.



Capaian ini hampir sama dari capaian tahun sebelumnya tetapi meningkat sedikit 0,41 Point.

Pangan merupakan kebutuhan esensial dan komoditas paling strategis dalam kehidupan manusia. Penyediaan pangan untuk konsumsi harus memenuhi

kebutuhan gizi penduduk. Salah satu masalah ketersediaan pangan adalah untuk mengetahui apakah penyediaan pangan yang ada mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk. Untuk itu perlu dipahami situasi pangan disuatu daerah dalam periode tertentu, selanjutnya diupayakan strategi untuk mencapai ketahanan pangan.

• Penyediaan / Pengadaan Pangan (Food Supply)

Penyediaan pangan dipengaruhi oleh jumlah produksi, perubahan stok, impor dan ekspor komoditi pangan tersebut disuatu wilayah.

Untuk melihat bagaimana penyediaan pangan di Kota Payakumbuh selama tahun 2022 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini .

Tabel 3.4

Penyediaan Pangan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Bahan Makanan di Kota Payakumbuh Tahun 2023 Berdasarkan Angka Tetap (ATAP)

		Penyediaan Pangan (Ton)								
No	Kelompok Pangan	Produksi	Perubahan Stok	Impor	Ekspor	Jumlah				
1	Padi-padian	40.627	60	24	0	40.590				
2	Makanan Berpati	4.259	0	32	0	4.291				
3	Gula	0	0	1.677	0	1.677				
4	Buah/Biji Berminyak	1.471	0	5.683	0	7.154				
5	Buah-buahan	4.885	0	3.472	0	8.357				
6	Sayuran	6.982	0	6.038	0	13.021				
7	Daging	6.596	0	0	0	6.596				
8	Telur	10.853	0	0	0	10.853				
9	Susu	25	0	0	0	25				
10	Ikan	1.572	0	3.007	0	4.579				
11	Minyak dan Lemak	504	0	3.599	0	4.103				
	Jumlah	77.773	60	23.532	0	101.245				

Sumber: BPS dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Berdasarkan Angka Tetap Tahun 2022

Pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa penyediaan pangan di Kota Payakumbuh tahun 2022 (angka tetap) yang memiliki jumlah produksi tertinggi diperoleh dari kelompok pangan padi-padian yaitu 40.627 ton dan jumlah terendah diperoleh dari kelompok pangan susu yaitu sebanyak 25 ton. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa kelompok pangan gula pada tahun 2023 tidak ada memiliki nilai produksi, hal ini disebabkan karena memang tidak adanya penyediaan dan ketersediaan bahan baku untuk memproduksi gula di Kota Payakumbuh, yang termasuk kelompok bahan pangan gula disini antara lain gula pasir, gula merah, gula aren, gula semut dan gula siwalan baik yang merupakan hasil olahan pabrik maupun rumah tangga.

• Penggunaan Pangan (Food Utilization)

Produksi pangan yang telah tersedia sebagian digunakan untuk keperluan pakan (*Feed*) dan bibit (*Seed*). Sebagian lagi diolah dalam industri menjadi makanan dan non makanan. Adapula yang digunakan sebagai bahan makanan dan sebagian lagi yang tercecer (*Waste*) selama penggunaannya. Untuk lebih jelas bagaimana penggunaan bahan pangan di Kota Payakumbuh pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3. 5 Penggunaan/Pemakaian Pangan di Kota Payakumbuh Tahun 2023 Berdasarkan Angka Sementara (ASEM)

		Penggunaan/Pemakaian Pangan (Ton) *)						
No.	Kelompok Bahan Pangan	Pakan	Bibit	Diolah untuk Makanan	Tercecer	Bahan Makanan		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Padi-padian	446	647	35.462	2.053	24.730		
2	Umbi-umbian/ Makanan Berpati	86	0	0	182	4.023		
3	Gula	0	0	0	67	1.609		
4	Buah Biji Berminyak	3	280	4.132	236	2.178		
5	Buah-buahan	0	0	0	93	8.264		

6	Sayuran	0	68	0	375	12.578
7	Daging	0	0	0	290	6.307
8	Telur	0	67	0	227	10.558
9	Susu	2	0	0	0	22
10	Ikan	0	0	0	45	4.535
11	Minyak/Lemak	0	0	0	61	4.042
	Jumlah	538	1.061	39.594	3.629	78.846

Sumber Data: Hasil Olahan DKP Kota Payakumbuh

Keterangan: *) Angka Tetap 2022

Dari data yang disajikan pada tabel 3.5 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 di Kota Payakumbuh kelompok pangan yang digunakan untuk pakan hanya terdiri dari 4 (empat) macam kelompok yaitu kelompok pangan padi-padian (446 ton); makanan berpati (86 ton); buah biji berminyak (3 ton) dan susu (2 ton). Kelompok pangan yang digunakan untuk bibit adalah kelompok pangan padi-padian (647 ton); sayuran (68 ton) Buah biji Berminyak (280 ton) dan telur (67 ton). Kelompok pangan yang diolah untuk makanan adalah padi-padian (35.462 ton) dan buah/biji berminyak (4.132 ton). Kelompok pangan yang paling banyak tercecer adalah kelompok pangan padi-padian yaitu sebanyak 2.053 ton, diikuti oleh sayuran sebesar 375 ton, daging 290 ton, buah / biji berminyak 236 ton, telur 227 ton, buah-buahan 93 ton ,dan yang tidak ada tercecer adalah kelompok pangan susu.

• Ketersediaan Pangan (Food Availability)

Ketersediaan pangan yaitu terjaminnya pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Pada tahun 2022 penduduk Kota Payakumbuh berjumlah 141.184 jiwa, kemudian pada tahun 2023 diproyeksikan meningkat menjadi 143.325 jiwa. Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi oleh perkapita penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Ketersediaan Pangan Untuk Dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2022 – 2023

No	Kelompok Makanan	Ketersediaan Panga	n (Kg/kapita/tahun)	+/-
140	Reformpor Maranan	2022*)	2023**)	
1	Padi-padian	169,44	175,16	+
2	Makanan Berpati	28,48	28,50	+
3	Gula	15,10	11,40	•
4	Buah/Biji Berminyak	19,83	15,43	•
5	Buah-buahan	61,87	58,54	•
6	Sayuran	60,28	89,09	+
7	Daging	31,00	44,67	+
8	Telur	58,69	74,78	+
9	Susu	0,04	0,16	+
10	Ikan	28,67	32,12	+

Sumber Data: Hasil Olahan DKP Kota Payakumbuh

Keterangan: *) Angka Tetap 2022

**) Angka Sementara 2023

Jumlah Penduduk: 143.325 jiwa

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat ketersediaan kelompok sayuran mengalami peningkatan secara signifikan yaitu dari tahun 2022 60,28 kg/kap/th setara 165,147 gr/kal/hari naik menjadi 89,09 kg/kap/th setara dengan 244,07 gr/kal/hari di tahun 2023, kemudian diikuti oleh kelompok daging pada tahun 2022 sebesar 31,00 kg/kap/th atau setara 84,93 gr/kal/hari Telur yaitu pada tahun 2022 sebesar 58,69 kg/kap/th setara 160,79 gr/kap/hari dan pada tahun 2023 sebesar 74,78 kg/kap/th setara 204,89 gr/kal/hari. Kemudian kelompok pangan daging juga naik cukup signifikan yaitu dari 31,00 kg/kap/th atau setara 84,93 gr/kal/hari pada tahun 2022 naik pada tahun 2023 menjadi 44,67 kg/kap/th atau setara dengan 122,38 gr/kal/hari, kelompok pangan padi-padian tahun 2022 yaitu 169,44 kg/kal/th setara 464,22 gr/kal/hari naik menjadi 175,16 kg/kal/th setara 479,90 gr/kal/hari.

Sedangkan ketersediaan kelompok pangan yang mengalami penurunan tahun 2022 sampai tahun 2023 kelompok gula pada tahun 2022 sebesar 15,10 kg/kap/th setara 41,38 gr/kal/hari turun menjadi 11,40 kg/kap/th setara 31,23 gr/kal/hari, buah biji berminyak dari 19,83 turun menjadi 15,43 ditahun 2023, buah-buahan juga mengalami penurunan di tahun 2022 61,87 turun menjadi 58,54 kg/kap/th. Menurunnya jumlah ketersediaan pangan untuk dikonsumsi seperti buah/biji berminyak, buah-buahan mungkin disebabkan oleh penurunan permintaan.

• Ketersediaan Bahan Makanan Tahun 2023

Ketersediaan bahan makanan diperoleh dari ketersediaan masing-masing bahan makanan dibagi dengan jumlah penduduk, disajikan dalam bentuk kuantum (volume) yang dinyatakan dalam satuan kg/kap/tahun dan gram/kap/hari dan kandungan gizi seperti energi, protein, lemak yang dinyatakan dalam satuan Kkal untuk energi, gram untuk protein dan lemak.

Secara umum ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Kota Payakumbuh tahun 2023 menunjukkan kelebihan/surplus terutama untuk kelompok padi-padian, makanan berpati, buah-buahan, sayuran, daging, telur, dan ikan sedangkan bahan pangan yang ketersediaannya dibawah kebutuhan (minus) yaitu susu (ketersediaan 6,52 % dari kebutuhan), dan minyak/lemak (ketersediaan 23,25 % dari kebutuhan) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3. 7
Perbandingan Ketersediaan Pangan di Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan	Kebutuhan	Perimbangan	
		(kg/Kap/Thn)	(kg/Kap/thn)	(%)	
1	Padi-padian	175,16	113,03	155	
	- Beras	175,16	113,03	155	
2	Umbi-umbian/ Makanan		17,67	161,30	
	Berpati	28,50			
3	Gula	11,40	7,53	151,31	
4	Buah Biji Berminyak	15,43	4,22	365,64	

5	Buah-buahan	58,54	43,03	136,04
6	Sayuran	89,09	45,84	194,35
7	Daging	44,67	13,39	333,61
8	Telur	74,78	10,78	693,69
9	Ikan	32,12	23,54	136,45
10	Susu	0,16	0,04	400

Sumber: Data olahan NBM oleh Dinas Ketahanan Pangan, berdasarkan angka tetap tahun 2022.

Di dalam Neraca Bahan Makanan juga memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu Neraca Bahan Makanan (NBM) terdiri atas tiga informasi utama yaitu: pengadaan pangan (produksi, impor dan perubahan stock); penggunaan pangan (ekspor, pakan, bibit/benih, industri, tercecer, tersedia untuk konsumsi); dan energi dan Gizi yang tersedia

Data yang digunakan dalam penyusunan NBM terdiri dari data sekunder dan data primer yang bersumber dari berbagai instansi terkait dan pihak-pihak lain yang berkompeten baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait terutama data yang telah dipublikasikan dan mempunyai legalitas dari Badan Pusat Statistik. SKPD yang terlibat antara lain: BPS, Dinas Pertanian, Koperasi UKM, Dinas Perhubungan dan Bulog Bukittinggi Dalam tabel NBM, bahan makanan menurut jenisnya dikelompokan menjadi 11 kelompok, yaitu padi-padian, makanan berpati, gula, buah/biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan dan minyak dan lemak. Penghitungan konsumsi energi dan protein menggunakan aplikasi/software NBM. Penghitungan untuk tahun 2022 menggunakan angka sementara (ASEM tahun 2022). Besarnya ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh dalam bentuk Natura tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Payakumbuh berdasarkan Neraca Bahan Makanan

NERACA BAHAN MAKANAN / FOOD BALANCE SHEET **TAHUN 2023** Penduduk pertengahan tahun: 143.325 iwa (ton) Penyediaan dalam Penyediaan Pemakaian Dalam Negeri / Domestic utilization Ketersediaan Per Kapita Produksi Production Perubah Impor negeri sblm Ekspor Ekspor Pengguna Bahan Dalam Diolah untuk Per capita availability Pakan Bibit Masukan Keluaran Changes Jenis Bahan Makanan Supply availa-Negeri Manufactured for Gram/ Kalori/ Protein/ Lemak/ an Lain Makanan Kg/Th Proteins Fats Input Output ble for domestic Domestic Bukan hari Calories Makanan Other Commodity Imports utilization before Exports Makanan Waste Stock Supply Feed Seed Food Grams/ kkal/hari Gram/hr Gram/hr Uses Kg/Year kcal/day day Grams/day Grams/day exports Food Non food (13) (14)(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11)(12)(15)(16)(18)(20)I. PADI-PADIAN/CEREALS 41,11 1.717 9,02 38.136 168 630 35.462 1.876 Gabah (GKG) lunhusked rice 38,136 38,136 35,462 Beras/Rice 22.702 22.702 22.702 39 22,662 160.51 439.76 1.588 38,57 7,04 Jagung/Maize 2.863 2.491 60 2.431 2.431 240 17 174 2.000 14,17 38,81 128 2,50 1,98 0,32 0,00 Jagung basah/ Fresh maize 45 45 45 0.88 0,00 Gandum/Wheat Tepung Gandum/ Wheat flour 0.45 0.17 0,00 24 24 24 23 0.04

Sumber: Data olahan NBM oleh Dinas Ketahanan Pangan, berdasarkan angka tetap tahun 2

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama Pangan Kota Payakumbuh dengan Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat dapat kita lihat seperti pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Ketersediaan Pangan Utama Dinas
Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov.
Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kota	Capaian Prov.Sumbar
		Payakumbuh	
1.	Ketersediaan Pangan	22.662 ton	858.597 ton
	Utama		

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, capaian kinerja Ketersediaan Pangan Utama Kota Payakumbuh turut menyumbang capaian ketersediaan pangan utama di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari capaian diatas baik di tingkat Kota Payakumbuh maupun Provinsi berada pada kondisi Surplus.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja ketersediaan pangan utama sebesar 22.662 ton dengan tingkat capaian 114,83 %. Capaian indikator kinerja ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis sangat baik, hal ini adalah karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh antara lain:

- Berkoordinasi dengan stakeholder terkait baik untuk mengamankan produksi ketika panen raya serta menyalurkan stock pada saat bencana atau produksi tidak mencukupi untuk memenuhi penyediaan pangan;
- Semua perngkat daerah serta stakeholder terkait ikut bersinergi, berkolaborasi dan berkoodinasi untuk membangun Ketahanan Pangan menjadi sumber kekuatan ekonomi di Kota Payakumbuh;
- 3. Pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna menurunkan jumlah anak stunting, gizi buruk, dan gizi kurang serta dalam pengendalian inflasi;
- 4. Koordinasi dengan stakeholder terkait (Bappeda, TAPD, DPRD, Bulog dan bagian Hukum) dapat mendukung pelaksanaan kegiatan CPPD di daerah, baik dalam hal dukungan anggaran untuk pengadaan CPPD maupun dalam hal penyusunan regulasi Peraturan Daerah tentang tata cara penyelenggaraan CPPD.

Faktor pendukung:

- Sosialisasi konsumsi olahan pangan local non beras non terigu yang berjalan dengan baik.
- 2. Koordinasi lintas sektor yang semakin baik.

Faktor Penghambat:

Masih kurang nya ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh faktor produksi dan distribusi (ekspor-impor) dan produksi saat ini sangat dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, kelancaran air (perbaikan irigasi) dan hama yang dialami, sehingga koordinasi lintas sector perlu terus ditingkatkan .

Sasaran pertama *Meningkatnya ketersediaan pangan* masuk dalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Sub Kegiatan yaitu, Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator kinerja ketersediaan pangan utama, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

- Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
- 2. Sumber anggaran yang memadai
- 3. Sarana Prasarana yang memadai

Tabel 3.10
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebih	Tindak Lanjut
		an	
Jumlah SDM sesuai	Jumlah SDM yang	Masih diperlukan	Mengisi kekurangan
persyaratan jabatan	mendukung kinerja	penambahan SDM	jabatan yang ada
dalam	belum cukup memadai	yang mempunyai	dengan mengangkat
mendukung	(1orang eselon 3, 1	kompetensi kelas	tenaga teknis yang
peningkatan	orang	jabatan serta	kompeten agar
ketahanan pangan	Analis Ketahanan	persyaratan jabatan	sasaran strategis

(6 orang Analis	Pangan dan 2 orang	yang sesuai	dapat optimal
Ketahanan Pangan	stafpada Bidang		dicapai
dan 3 orang Analis	Ketersediaan dan		
Pasar Hasil Pertanian	Cadangan Pangan)		
serta pada Bidang			
Distribusi dan			
Cadangan Pangan 1			
orang eselon 3 dan			
5 orang Staf			
Sumber anggaran	Anggaran yang ada saat	Masih dibutuhkan	Penambahan
yang dapat	ini dioptimalkan untuk	penambahan	anggaran
mendukung capaian	mendukung capaian	anggaran untuk	
kinerja	sasaran strategis dengan	pencapaian kinerja	
	penganggaran tepat		
	guna		
Tercukupinya sarana	Belum terpenuhinya	Perlunya sarana dan	Pemenuhan
dan prasarana untuk	sarana prasarana yang	prasarana kerja yang	kebutuhan sarana
mendukung kinerja	dibutuhkan untuk	memadai untuk	prasarana
	mendukung capaian	membantu	
	kinerja	pemantauan harga,	
		stok dan pasokan	

Sumber : Data diolah, DKP 2023

Pada sasaran 1 ini termasuk kedalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.487.400,- dan realisasi sebesar Rp. 64.301.068,- atau 99.71 %. Sedangkan alokasi anggaran Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 197.850.240,- dan realisasi sebesar Rp. 194.658.260,- atau 98,38%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran 1 ini cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai baik.

• Analisis efektifitas dan efisiensi capaian kinerja

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran *Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan*, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberagaman Ketersediaan Pangan

						Kinerja			Keuangan			
No	Sasaran	Indika	ator	Satuan	Target	Realisa si	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1		1.1	Ketersedia an pangan utama	ton	19.735	22.662	114,83	2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan	64.487.400 197.850.240	64.301.068 194.658.260	99,71
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					114,83	TOTAL PER SASARAN		262.337.640	258.959.328	98,71
	•	•			TING	SKAT <u>EFISI</u> I	ENSI 16,12	2 %				
					TING	AT <u>EFEKTI</u>	FITAS 116,3	33 %				

Sumber: DKP, 2023

Dari Tabel 3.11 diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 16,12%, hal ini disebabkan oleh capaian kinerja 114,83% sedangkan capaian anggaran 98,71% sehingga jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan. Untuk tingkat efektifitas, pada sasaran 1 sebesar 116,33%. Hal ini menunjukkan tingkat efiseinsi yang cukup tinggi dengan tingkat efektifitas sebesar 116,33%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki kinerja yang efektif dan efisien karena dengan pencapaian yang melebihi target dapat dilakukan efisinsi sebesar 16,12% dari anggaran yang direncanakan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran *Meningkatkan ketersediaan pangan* berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb:

- Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
- 2. Melakukan evaluasi time schedule kegiatan sehingga lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan sesuai kondisi yang ada

Sasaran 2

Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2022		%	Capaian Tahun 2023		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap
	Kinerja		Target	Realisasi		Target	Realisasi				akhir renstra (%)
1	Skor PPH Konsumsi	%	85	85,09	100, 10	85,10	87,3	102, 58	Sangat baik	85,40	102,22
2	Tingkat Keamanan Pangan	Level	tinggi	tinggi	100	tinggi	tinggi	100	Sangat baik	Tinggi	100

Sumber : DKP, 2023

Sasaran meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Skor PPH Konsumsi dan Tingkat Kemanan Pangan.

A. Indikator Pertama yaitu Skor PPH Konsumsi

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan (RPJMN) 2015-2019 ada empat (4) strategi utama :

- 1. Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
- 2. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
- 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
- 4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan

Salah satu dari empat (4) arah kebijakan pangan yaitu perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat telah menjadi indicator yang cukup strategis dan merupakan indicator kinerja dibidang ketahanan pangan yaitu pencapaian skor PPH Konsumsi. Pentingnya pencapaian skor PPH Konsumsi tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU)



No 18 Tahun 2012 tentang dan Pangan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 Tahun 2012 disebutkan Pemerintah bahwa dan Pemerintah Daerah mewujudkan berkewajiban penganekaragaman konsumsi untuk memenuhi pangan kebutuhan gizi masyarakat.

Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai konsumsi pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Menurut FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH Konsumsi sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor Pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah. Skor PPH di niai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan

penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan memepertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tersebut akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Apabila keragaman konsumsi pangan dibawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan pangan dan gizi, peningkatan ketersediaan, serta pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk penghitungan data PPH Konsumsi Tahun 2023 berdasarkan data sekunder berasal dari data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu jenis data sekunder yang digunakan untuk analisis konsumsi pangan. Survey tersebut dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang terdiri dari data Nasional, Provinsi dan Kota. Data yang dikumpulkan merupakan data konsumsi/pengeluaran Rumah Tangga mencakup data makanan dan bahan makanann untuk konsumsi/pengeluaran makanan dikumpulkan data kuantitas dan nilainya sesuai dengan rincian komoditas yang terdapat pada kuisioner Susenas. Dalam analisis konsumsi pangan, khususnya menggerakan data survey konsumsi pangan, diperlukan data/instrument pendukung antara lain Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) , Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Pangan Acuan, Daftar Konversi Perubahan Bentuk, Daftar Konversi Kode Kelompok Pangan, Daftar Konversi Penyerapan minyak.

Setelah dilakukan penghitungan PPH Konsumsi dengan Angka Kecukupan Energi 2.100 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein 57 gr/kapita/hr didapat nilai PPH Konsumsi Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebesar 87.3 dengan capaian kinerja 102,58% termasuk kategori sangat baik.

Hasil penghitungan PPH tahun 2023 yang didasarkan pada basis data survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini

Tabel 3.13 SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI TAHUN 2023

		Berat	Pe	rhitung	gan Sk	or Pola	a Panga	n Hara	pan (PP	'H)
No	Kelompok Pangan	Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	291,3	1,103	56,3	52,5	0.5	28.2	26,3	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	34,8	32	1,6	1,5	0.5	0,8	0,8	2.5	0,8
3	Pangan Hewani	119,4	301	15,4	14,3	2.0	30,7	28,7	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	27,3	246	12,5	11,7	0.5	6.3	5,9	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	6,2	33	1.7	1.6	0.5	0.8	0.8	1.0	0.8
6	Kacang- kacangan	15,7	46	2,4	2,2	2.0	4,7	4,4	10.0	4,4
7	Gula	12,8	48	2.4	2,3	0.5	1.2	1.1	2.5	1.1
8	Sayur dan Buah	206,4	110	5.6	5,2	5.0	28,0	26,2	30.0	26,2
9	Lain-lain	69,9	41	2,1	1,9	25,0	51,9	48, 2	-	-
	Total		1960	100	93,3		94,6	91,1	100,0	87,3

Sumber: Data Susenas Tahun 2022

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi = 2.100/kkal/kapita/hari

*) Angka Kecukupan Protein = 57 gram/kap/hari

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1 diatas, terlihat bahwa skor PPH Kota Payakumbuh adalah sebesar 87,3 (AKE 2100 kkal/kap/hari dan AKP 57 gram/kap/hari). Angka ini masih jauh dari target ideal skor PPH yang diharapkan (100). Kualitas konsumsi pangan Kota Payakumbuh tahun 2023 belum beragam, ditandai dengan skor PPH sebesar 87,3 belum mencapai skor PPH ideal 100. Oleh karena itu untuk kedepannya dibutuhkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang tepat dan nyata untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Untuk mengejar ketertinggalan dalam mencapai target PPH maka perlu ditingkatkan konsumsi beberapa kelompok pangan yang perlu diperbaiki terutama konsumsi pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah. Adapun konsumsi energi kelompok pangan yang tergolong berlebih yakni padi-padian, pangan hewani serta minyak dan lemak.

Untuk konsumsi kelompok pangan padi-padian yang didominasi oleh konsumsi beras sudah melebihi target yang dianjurkan. Diversifikasi pangan terutama penghasil karbohidrat sangat dianjurkan agar konsumsi kelompok padi-padian tidak melebihi konsumsi yang dianjurkan. Kelompok pangan umbi-umbian sebagai penghasil sumber karbohidrat selain padi-padian masih dibawah target yang dianjurkan. Kedepannya konsumsi karbohidrat sumber umbi-umbian perlu digalakkan agar diversifikasi pangan dapat terlaksana dengan baik. Untuk kelompok pangan hewani sudah melebihi target yang dianjurkan, didominasi oleh konsumsi daging ruminansia, daging unggas, ikan, telur dan susu.

Kualitas Konsumsi pangan Kota Payakumbuh sudah cukup baik (Skor PPH 87,3). Akan tetapi masih belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan oleh :

- Konsumsi pangan sumber karbohidrat (beras dan terigu) melebihi anjuran
- Konsumsi pangan hewani masih kurang
- Konsumsi umbi-umbian masih kurang
- Konsumsi kacang-kacangan masih kurang

- Konsumsi sayuran dan buah masih kurang
- Disamping itu disebabkan juga oleh rendahnya daya beli masyarakat

Solusinya adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia disekitar rumah untuk meningkatkan kecukupan pangan dan gizi keluarga yaitu melalui pemanfaatan pekarangan yang dikelola dan dikembangkan keluarga. Dengan memanfaatkan pekarangan secara intensif diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan ditingkat rumah tangga dan menambah pendapatan keluarga apabila produksinya berlebih yang paling penting dapat meningkatkan Skor PPH Konsumsi.

Jika diperhatikan perkembangan capaian Skor PPH Konsumsi ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Indikator Skor PPH Konsumsi dijadikan sebagai indikator dalam sasaran *Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman* baru dilakukan pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran untuk penghitungan Skor PPH Konsumsi. Capaian kinerja indikator Skor PPH Konsumsi untuk Tahun 2018 yakni diperoleh skor 84,1

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada Tahun 2019 tercapai 82 dari target 82 atau terealisasi sebesar 100 %. Dan untuk Tahun 2020 dari target 83 terealisasi sebesar 83,7 atau 100,84%. Tahun 2021 tercapai 84,20 dari target 84 atau 100,24%. Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2018-2023, dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Konsumsi
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Realisasi								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.	Skor PPH Konsumsi	84,1	82	83,7	84,20	85,09	87,3			

Sumber: Data diolah DKP, 2023

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini artinya konsumsi pangan masyarakat kota payakumbuh sudah semakin beragam.

Pada tahun berikutnya diharapkan terjadi peningkatan hingga target skor Pola Pangan Harapan (PPH) bernilai 100 dapat tercapai, karena sasaran pembangunan nasional dibidang pangan dan gizi adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi pada tingkat rumah tangga yang tercermin pada ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup mutu dan gizinya, layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.

Konsumsi Pangan Penduduk Kota Payakumbuh

Konsumsi pangan per kelompok pangan di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut.

Tabel 3. 15
Konsumsi Pangan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2023

		ungan izi		umsi gan	Kebutuhan Pangan
Kelompok/Jenis Pangan	Energi (kkal/hr)	Protein (gr/hr)	Gr/kap /hr	Kg/kap /thn	Kg/Kapita /Tahun
1. Padi-Padian					
Beras	894,2	20,9	254,1	92,7	102,0
Jagung	0,9	0,0	0,6	0,2	0,2
Terigu	208,3	4,0	36,6	13,4	14,7
Subtotal Padi-padian	1,103, 3	24,9	291,3	106,3	117,0
2. Umbi-umbian					
Singkong	18,7	0,2	16,1	5,9	6,4
Ubi Jalar	4,4	0,0	3,1	1,1	1,2
Kentang	7,7	0.3	14,8	5,4	5,9
Sagu	-	-	-	-	-
Umbi Lainnya	1,0	0,0	1,0	0,3	0,4
Subtotal Umbi-umbian	31,9	0,5	34,8	12,7	14,0

	Kandungan Gizi			umsi gan	Kebutuhan Pangan
.,	Energi	Protein	Gr/kap	Kg/kap	Kg/Kapita
Kelompok/Jenis Pangan	(kkal/hr)		/hr	/thn	/Tahun
	,	(3)			
3. Pangan Hewani					
Daging Ruminansia	108,3	6,0	18,8	6,9	7,5
Daging Unggas	75,3	5,8	24,5	8,9	9,8
Telur	34,0	2,7	24,3	8,9	9,8
Susu	22,7	0,8	5,7	2,1	2,3
Ikan	60,5	9,9	46,1	16,8	18,5
Subtotal Pangan Hewani	300,8	25,2	119,4	43,6	48,0
4. Minyak dan Lemak					
Minyak Kelapa	12,7	0,0	1,5	0,5	0.6
Minyak Lainnya	230,5	ı	25,6	9,3	10,3
Margarin	2,7	0,0	0,3	0,1	0,1
Subtotal Minyak dan	245,9	0,0	27,3	10,0	11,0
Lemak	, .	-,-		, .	,•
5. Buah/Biji Berminyak	00.7	0.0	0.4	0.0	0.5
Kelapa	32,7	0,3	6,1	2,2	2,5
Kemiri Subtotal Buah/Biji	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Berminyak	32,9	0,3	6,2	2,2	2,5
6. Kacang-kacangan					
Kacang Kedelai	41,3	3,2	13,5	4,9	5,4
Kacang Tanah	1,5	0,1	0,3	0,1	0,1
Kacang Hijau	3,2	0,3	1,7	0,6	0,7
Kacang lain	044	0,0	0,1	0,1	0,1
Subtotal Kacang-	46,5		15,7		6,3
kacangan	40,5	3,6	15,7	5,7	0,3
7. Gula					
Gula Pasir	45,9	0,0	12,3	4,5	4,9
Gula Merah	1,8	0,0	0,5	0,2	0,2
Subtotal Gula	47,8	0,0	12,8	4,7	5,1
8. Sayur dan Buah	40.0	0.4	400.0	00.0	40.0
Sayur	49,6	2,4	106,6	38,9	42,8
Buah Subtotal Sayur dan	60,3	0,9	99,7	36,4	40,0
Buah	109,9	3,4	206,4	75,3	82,9
9. Lain-lain					
Minuman	38,0	1,2	62,0	22,6	24,9
Bumbu	2,7	0,1	8,0	2,9	3,2
Subtotal Lain-lain	40,7	1,2	69,9	25,5	28,1

Sumber data: Data Susenas 2022

Dari Tabel 3 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada kelompok pangan padi-padian, konsumsi pangan yang dominan di Kota Payakumbuh adalah beras dibandingkan dengan jagung dan terigu. Konsumsi kelompok pangan padi-padian ini sudah melebihi target. Kedepannya konsumsi padi-padian ini diharapkan dapat lebih ditekan/dikurangi agar mencapai target yang dianjurkan.
- 2. Untuk kelompok pangan umbi-umbian, konsumsinya belum mencapai target konsumsi pangan umbi-umbian. Komoditi pangan umbi-umbian yang sangat dominan yang dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh yaitu singkong dibandingkan dengan komoditi umbi-umbian lainnya seperti kentang, ubi jalar, dan umbi lainnya seperti talas. Konsumsi umbi –umbian untuk Kota Payakumbuh karena tidak ada kegiatan sfesifik dari dinas terkait yaitu pertanian untuk menunjang peningkatan hasil umbi umbian karena hanya ditanam dilahan –lahan kurang produktif. Umbi yang dihasilkan Kota Payakumbuh rata-rata dikonsumsi dalam bentuk sanjai, karak kaliang, kerupuk ubi, kerupuk balado, kerupuk talas, makanan ini dikonsumsi masuk dalam kategori makanan ringan dalam penghitungan tidak mendukung PPH Konsumsi umbi umbian
- Pada kelompok pangan hewani, konsumsi pangannya melebihi target. Komoditi pangan hewani yang banyak dikonsumsi masyatakat di Kota Payakumbuh yaitu daging ruminansia, daging unggas, ikan, telur, susu
- 4. Pada kelompok pangan minyak dan lemak sudah melebihi target dikarenakan tingginya konsumsi pada komoditi minyak sawit.
- 5. Untuk kelompok pangan buah/biji berminyak konsumsinya belum mencapai target. Komoditi yang banyak dikonsumsi adalah kelapa seperti dalam pembuatan rendang, gulai, takjil ketika ramadhan yang membutuhkan kelapa sehingga konsumsinya lebih banyak dibandingkan kemiri.
- 6. Pada kelompok pangan kacang-kacangan, konsumsinya juga belum mencapai target. Untuk kelompok pangan kacang-kacangan, jenis pangan yang dominan dikonsumsi yaitu kacang kedelai. Hal ini bisa disebabkan karena konsumsi olahan kacang kedelai dalam bentuk tahu dan tempe.

- 7. Untuk kelompok pangan gula konsumsinya belum mencapai target. Komoditi yang dominan dikonsumsi yaitu jenis pangan gula pasir yang biasa digunakan pada setiap minuman seperti teh, kopi, dll. Walaupun gula pasir dominan dikonsumsi akan tetapi belum mencapai target yang diharapkan.
- 8. Pada kelompok pangan sayur dan buah konsumsinya belum mencapai target yang dianjurkan. Dari kegiatan Pekarangan Pangan Lestari , sayuran sudah diproduksi dari halaman sendiri untuk dikonsumsi, kondisi kurang konsumsi sayur permasalahannya pada merubah kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi sayur setiap kali makan karena sayur yang ada dipekarangan ada sebagian anggota KWT tidak mau memetik karena bagus dipandang melihat sayuran yang subur, untuk merubah perilaku dan kebiasaan makan sayur pada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Diharapkan kedepannya masyarakat Kota Payakumbuh untuk dapat mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin setiap kali makan.

• Perkembangan Capaian Konsumsi Energi dan Protein Kota Payakumbuh

Perkembangan capaian konsumsi energi dan protein setiap kelompok pangan di Kota Payakumbuh pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.16
Perkembangan Capaian Konsumsi Energi dan Protein Perkelompok Pangan
Tahun 2021 s/d 2023

No	Kelompok Pangan		sumsi Ener kal/kap/hr	umsi Energi al/kap/hr)		Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Padi-padian	1.178	1.154	1.103	26,9	26,3	24,9
2	Umbi-umbian	66	41	32	3,2	0,6	0.5
3	Pangan hewani	302	272	301	14,7	23,0	25,2
4	Minyak dan lemak	251	277	246	12,3	0,0	0.0

5	Buah biji berminyak	31	35	33	1,5	0,3	0.3
6	Kacang-kacangan	28	64	46	1,4	3,3	3.6
7	Gula	51	48	48	2,5	0,0	0.0
8	Sayur dan buah	101	92	110	4,9	2.9	3,4
9	Lainnya	38	39	41	1.9	1.2	1.2
	Jumlah	2.045	2.022	1.960	59,2	57,7	59,2

Sumber: Analisis data PPH berdasarkan data Susenas 2021 s/d 2023

Dari tabel 3.16 diatas, hasil analisa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 (sembilan) kelompok pangan terjadi fluktuasi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

- 1. Konsumsi energi secara keseluruhan dari 9 (sembilan) kelompok pangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan yaitu tahun 2021 adalah 2.045 kkal/kap/hr, tahun 2022 adalah 2.022 kkal/kap/hr, dan tahun 2023 adalah 1.960 kkal/kap/hr. pada tahun 2021 sd 2023 lebih rendah dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 2.100 kkal/kap/hr tetapi masih dalam kategori normal.
- 2. Konsumsi protein secara keseluruhan dari 9 (sembilan) kelompok pangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi penurunan, yaitu tahun 2021 adalah 59,2 gram/kap/hr, tahun 2022 adalah 57,7 gram/kap/hr, dan tahun 2023 adalah 59,2 gram/kap/hr. Konsumsi protein tahun 2021 s/d 2023 lebih tinggi dari Angka Kecukupan protein yang dianjurkan Widya Karya Nasional pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 57 gram/kap/hr

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat serta capaian Nasional

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja Indikator Skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat dan secara Nasioinal dapat kita lihat seperti pada Tabel 3.17 berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Konsumsi Dinas Ketahanan
Pangan Kota Payakumbuh dengan Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov. Sumatera
Barat serta capaian Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian	Capaian	Capaian
		Kota	Prov.Sumbar	Nasional
		Payakumbuh		
1.	Skor PPH Konsumsi	87,3	90,5	94,1

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, capaian kinerja Skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh masih rendah dibandingkan capaian tingkat Provinsi bahkan Nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk Kota Payakumbuh sudah mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Namun demikian ada jenis konsumsi yang perlu kita tingkatkan angka persentasenya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan
 Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan
 (PPH) sebesar 87,3 dengan tingkat capaian 102,58%. Capaian indikator kinerja skor
 PPH sangat baik,

Adapun hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

- Masih belum idealnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat disebabkan kebiasaan pola makan masyarakat yang belum beragam dan berimbang.
- Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- Pemanfaatan pangan lokal di Kota Payakumbuh masih dominan sebagai makanan pendamping, belum bisa sebagai subtitusi pangan / makanan pengganti pokok berupa beras dan terigu.
- Belum berkembangnya industry pangan local di Kota Payakumbuh

Faktor pendukung:

Didukung dengan program beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta sosialisasi dan pelatihan pangan lokal.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam peningkatan diversifikasi konsumsi masyarakat adalah:

- Perlu adanya Gerakan/Kampanye Diversifikasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam melaksanakan edukasi / sosialisasi ke masyarakat.
- Sangat diperlukan pengembangan SDM pelaku usaha pengolahan pangan lokal dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan manajemen usaha, kewirusahaan dan strategi bisnis pengolahan pangan lokal
- Hasil olahan pangan lokal yang ada di kelompok binaan/UKM sebaiknya dipromosikan melalui event pameran atau pada acara kedinasan sebaiknya menu/snack yang disediakan adalah pangan local
- 4. Jaringan usaha pengolahan pangan lokal yang melibatkan stakeholder dan off taker terkait harus ditingkatkan untuk memudahkan pelaku usaha pangan lokal dalam manajemen usaha, suplai bahan baku, promosi dan pemasaran maupun akses terhadap permodalan

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman , diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

- 1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
- 2. Sumber anggaran yang memadai
- 3. Sarana Prasarana yang memadai

Tabel 3.18
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebih	Tindak Lanjut
		an	
Jumlah SDM sesuai	Jumlah SDM yang	Masih diperlukan	Mengisi kekurangan
persyaratan jabatan	mendukung kinerja	penambahan SDM	jabatan yang ada
dalam	belum cukup memadai	yang mempunyai	dengan mengangkat
mendukung	(1orang Kabid, 1 orang	kompetensi kelas	tenaga teknis yang
peningkatan	Analis Ketahanan	jabatan serta	kompeten agar
ketahanan pangan	Pangan dan 1 orang	persyaratan jabatan	sasaran strategis
(1 orang Kabid, 4	penelaah teknis	yang sesuai	dapat optimal
orang Analis	kebijakan)		dicapai
Ketahanan Pangan			
dan 2 orang			
pelaksana teknis			
kebijakan serta 4			
orang pengolah data			
dan informasi			

Sumber anggaran	Anggaran yang ada saat	Masih belum	Optimalisasi
yang dapat	ini belum optimal untuk	terpenuhinya	anggaran untuk
mendukung capaian	mendukung capaian	anggaran untuk	capaian indicator
kinerja	sasaran strategis dengan	pelaksanaan	kinerja dan program
	penganggaran tepat	Gerakan/ Kampanye	
	guna	pangan B2SA ,	
		pelatihan pangan	
		lokal	
Tercukupinya sarana	Sarana dan prasarana	Perlunya sarana dan	Optimalisasi sarpras
dan prasarana untuk	belum optimal untuk	prasarana kerja yang	yang ada serta
mendukung kinerja	mendukung capaian	memadai untuk	penggunaan sarpras
	kinerja	membantu	tepat guna
		kelompok dalam	
		pengolahan pangan	
		lokal	

Sumber : Data diolah, DKP 2023

Sasaran kedua *Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam,bergizi seimbang dan aman* dengan indicator Skor PPH Konsumsi dicapai melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat serta Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 473.480.710,- dan realisasi sebesar Rp. 449.400.390,- atau 94,91%. Serapan anggaran untuk sasaran ini cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai baik.

B. Indikator kedua adalah Tingkat Keamanan Pangan



Makanan merupakan sumber energi dan sebagai zat gizi untuk mendukung hidup tetapi makanan manusia. juga dapat menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia. secara umum bahaya yang timbul makanan/minuman dari sering disebut keracunan makanan. Timbulnya bahaya dapat terjadi melalui unsur mikroorganisme, kimia atau alami.

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang "standardisasi Nasional" yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No. 170 tahun 2006 tetang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahanbahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri, dan formalin. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Dalam rangka pengawasan keamanan pangan di Kota Payakumbuh dilakukan pengujian terhadap sampel

pangan segar. Sampel diambil di pasar Ibuh Payakumbuh. Uji yang dilakukan adalah pengujian terhadap kandungan pestisida dan formalin.

Pengujian sampel dilakukan terhadap 30 sampel pangan segar diantaranya pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal ikan. Sampel pangan segar diambil dari Pasar Ibuh Kota Payakumbuh. Pemeriksaan sampel dilakukan sebanyak 3 kali, yakni 2 kali uji residu pestisida dan 1 kali uji formalin.

a) Uji Residu Pestisida

Uji residu pestisida dilakukan terhadap sampel pangan segar asal tumbuhan dengan jumlah 20 (dua puluh) sampel pangan segar asal tumbuhan. Pengambilan sampel dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 Februari 2023 dan 12 April 2023.

Sampel Pangan Segar tanggal 23 Februari 2023
 Jumlah Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diambil sebanyak 10 jenis.
 Uji residu pestisida dilakukan di Laboratorium Pestisida Balai Perlindungan Tanaman
 Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Padang. Sampel diantarkan
 pada tanggal 24 Februari 2023.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan oleh Laboratorium pada tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.19 Hasil Uji Residu Pestisida Sampel PSAT 23 Februari 2023

No	Komoditi	Jenis	Hasil	Batas	BMR
			(mg/kg)	Penetapan	(mg/kg)
				(mg/kg)	
1.	Cabe Merah	Profenofos	0,191	0,005	3,000
			Tidak terdeteksi	0,059	0,050
		Dimethoat	Tidak terdeteksi	0,024	0,200

2.	Caisi	Diazinon	Tidak terdeteksi	0,020	-
		Klorfirifos	Tidak terdeteksi	0,059	-
		Profenofos	Tidak terdeteksi	0,005	-
3.	Kentang	Diazinon	Tidak terdeteksi	0,020	0,010
		Methidation	Tidak terdeteksi	0,035	0,020
		Dimethoat	Tidak terdeteksi	0,024	0,050
4.	Wortel	Diazinon	Tidak terdeteksi	0,020	0,500
		Malation	Tidak terdeteksi	0,060	-
		Dimethoat	Tidak terdeteksi	0,024	-
5.	Buncis	Diazinon	Tidak terdeteksi	0,020	-
		Klorfirifos	Tidak terdeteksi	0,059	0,100
		Methidation	Tidak terdeteksi	0,035	-
6.	Brokoli	Diazinon	Tidak terdeteksi	0,020	1,000
		Klorfirifos	Tidak terdeteksi	0,059	2,000
		Profenofos	Tidak terdeteksi	0,005	-
7.	Tomat	Diazinon	Tidak terdeteksi	0,020	0,500
		Klorfirifos Metil	Tidak terdeteksi	0,059	1,000
		Methidation	Tidak terdeteksi	0,035	0,100
8.	Bawang Merah	Diazinon	Tidak terdeteksi	0,020	0,050
		Malation	Tidak terdeteksi	0,060	1,000
		Methidation	Tidak terdeteksi	0,035	0,100

9.	Cabe Rawit	Diazinon	Tidak terdeteksi	0,020	0,050
		Klorfirifos	Tidak terdeteksi	0,059	0,050
		Dimethoat	Tidak terdeteksi	0,024	0,200
10.	Cabe Hijau	Diazinon	Tidak terdeteksi	0,020	0,050
		Klorfirifos	Tidak terdeteksi	0,059	0,050
		Dimethoat	Tidak terdeteksi	0,024	0,200

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang terdeteksi mengandung residu pestisida adalah cabe merah (residu jenis Profenofos sebanyak 0,191 mg/kg), tetapi masih berada di bawah Batas Maksimum Residu (BMR) 3,000 mg/kg, artinya masih aman untuk dikonsumsi.

Sampel 12 April 2023

Jumlah Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diambil sebanyak 10 jenis. Uji residu pestisida dilakukan di Laboratorium Keamanan Pangan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Dinas Pangan Provnisi Sumatera Barat di Padang. Sampel diantarkan pada tanggal 14 April 2023.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan oleh Laboratorium pada tanggal 26 April 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.20 Hasil Uji Residu Pestisida Sampel PSAT 12 April 2023

No	Komoditi	Jenis	Hasil (mg/kg)	Batas Penetapan (mg/kg)	BMR (mg/kg)
1.	Cabe Merah Kering	Sipermetrin Permetrin Deltametrin	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	0,023 0,097 -	-
2.	Bawang Merah Solok	Endosulfan Deltametrin Sipermetrin	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	- - 0,023	2,000 0,050 0,100
3.	Selada	Permetrin Sipermetrin Endosulfan Sulphate	0,039 Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	0,097 0,023 -	0,200 - -
4.	Timun	Sipermetrin Permetrin Endosulfan	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	0,097 0,500 0,500	0,200 0,500 0,500
5.	Tombak Bawang	Deltametrin Sipermetrin Permetrin	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	- 0,097 0,023	- - -

No	Komoditi	Jenis	Hasil (mg/kg)	Batas Penetapan	BMR (mg/kg)
6.	Daun Bawang	Sipermetrin Permetrin Endosulfan	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	0,097 0,023 -	0,500 0,200 -
7.	Caisin	Deltametrin Sipermetrin Permetrin	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	- 0,097 0,023	0,500 2,000 0,200
8.	Labu Siam	Heptachlor Deltametrin Permetrin	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	- - 0,023	- - 0,500
9.	Seledri	Permetrin Sipermetrin Endosulfan	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	0,023 0,097 -	2,000 - 2,000
10.	Lemon	Sipermetrin Permetrin Deltametrin	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi	0,097 0,023 -	2,000 0,500 0,020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang terdeteksi mengandung residu pestisida adalah selada (residu jenis Permetrin sebanyak 0,039 mg/kg), tetapi masih berada di bawah Batas Maksimum Residu (BMR) 3,000 mg/kg, artinya masih aman untuk dikonsumsi

b) Uji Formalin

Uji formalin dilakukan terhadap sampel pangan segar asal ikan sebanyak 10 (sepuluh) sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023. Uji Formalin dilakukan di Laboratorium UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang. Sampel diantarkan pada tanggal 15 Maret 2023.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan oleh Laboratorium pada tanggal 17 Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Hasil Uji Formalin Sampel PSAI 14 Maret 2023

No	Sampel	Formalin
1.	Udang	Negatif
2.	Cumi	Negatif
3.	Ikan sarau	Negatif
4.	Ikan Gambolo	Negatif
5.	Ikan bada	Negatif
6.	Ikan tongkol	Negatif
7.	Ikan baguak	Negatif
8.	Ikan tenggiri	Negatif
9.	Ikan press	Negatif
10.	Ikan teri	Negatif

Dari pengujian laboratorium didapatkan hasil bahwa semua sampel pangan segar asal ikan negatif dari cemaran formalin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan aman untuk dikonsumsi.

Dari pemeriksaan terhadap 30 sampel yang terdiri dari residu pestisida 20 komoditi dan formalin 10 komoditi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

No	Pemeriksaan Yang Dilakukan	Jumlah sampel diperiksa	Hasil Analisa Yang Tidak Aman	% sampel makanan yang aman dikonsumsi	Ket
1.	Residu pestisida	20	0 komoditi	100%	tinggi
2.	Formalin	10	0 komoditi	100 %	tinggi
	Tingkat Keamanan Pangan			100	Tinggi

Keterangan Level Tingkat Keamanan:

0 -60 % : Tidak Aman

61 - 75 % : Cukup

76 – 85 % : sedang

70-85 % . Sedang

86 – 100 % : Tinggi

Jika diperhatikan perkembangan capaian Tingkat Keamanan Pangan ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Tingkat Keamanan Pangan pada Tahun 2018 tercapai 100% dari target level sedang, begitu juga dari Tahun 2019- 2023 terealisasi 100% .Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Pangan dari Tahun 2017-2022, dapat kita lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan
Tahun 2018-2023

N	Indikator	Satuan	Realisasi					
0.			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Keamanan Pangan	Level	sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: DKP, 2023

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan Dinas Ketahanan
 Pangan Kota Payakumbuh dengan Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat serta Nasional

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat dan Nasional dapat kita lihat seperti pada Tabel 3.23 berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov. Sumbar serta Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kota	Capaian	Capaian
		Payakumbuh	Prov.Sumbar	Nasional
1.	Tingkat Keamanan	100% (Tinggi)	83,50% (Sedang)	85% (Sedang)
	Pangan			

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, capaian kinerja Tingkat Keamanan Pangan di Kota Payakumbuh sudah tinggi dibandingkan capaian tingkat Provinsi bahkan Nasional.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan
 Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Tingkat Keamanan Pangan
 sebesar 100% dengan tingkat keamanan Tinggi.

Hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

- Masih terbatasnya jumlah serta komoditi yang menjadi sampel pengujian karena keterbatasan anggaran.
- 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah mutu dan keamanan pangan baik di tingkat Produsen maupun di tingkat konsumen
- 3. Belum berjalan maksimalnya pengregistrasian PSAT-PDUK

Faktor pendukung

Didukung dengan program pengawasan keamanan pangan serta sosialisasi keamanan pangan. Masalah keamanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, tetapi merupakan tugas bersama antara instituisi dan stake holder dengan membentuk jejaring kerja (Networking) yang berjalan secara efektif dan efisien.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam peningkatan keamanan pangan masyarakat adalah:

- Perlu adanya payung hukum dalam rangka penjabaran pelaksanaan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di Kota Payakumbuh
- 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kemanan pangan. Pengawasan pangan segar dapat dilakukan sebelum produk dipasarkan (pre market) dan pengawasan yang dilaksanakan setelah produk sampai di pasar (post market).

- 3. Meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen yang kuat disetiap jajaran terkait, mulai dari dan pelaku usaha untuk menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) agar produk yang dihasilkan tidak hanya aman di konsumsi, tetap juga meningkatkan nilai tambah.
- 4. Masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif tentang sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian kepada pelaku usaha, sehingga mereka bisa memahami akan pentingnya sertifikasi terhadap produk yang dihasilkannya.
- 5. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dan tingkat keberhasilan hasil kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di daerah, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat dengan indikator kinerja Tingkat Keamanan Pangan, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

- 1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
- 2. Sumber anggaran yang memadai
- 3. Sarana Prasarana yang memadai

Tabel 3.24
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebih	Tindak Lanjut
		an	
Jumlah SDM sesuai	Jumlah SDM yang	Masih diperlukan	Mengisi kekurangan
persyaratan jabatan	mendukung kinerja	penambahan SDM	jabatan yang ada
dalam	belum cukup memadai	yang mempunyai	dengan mengangkat

mendukung	(1orang Kabid, 1 orang	kompetensi kelas	tenaga teknis yang
peningkatan	Analis Ketahanan	jabatan serta	kompeten agar
ketahanan pangan	Pangan dan 1 orang	persyaratan jabatan	sasaran strategis
(1 orang Kabid, 4	penelaah teknis	yang sesuai	dapat optimal
orang Analis	kebijakan)	, 3	dicapai
Ketahanan Pangan	······································		
dan 2 orang			
pelaksana teknis			
kebijakan serta 4			
orang pengolah data			
dan informasi			
dan imormasi			
Sumbor anggaran	Anggaran yang ada saat	Masih belum	Optimalisasi
Sumber anggaran	Anggaran yang ada saat		
yang dapat	ini belum optimal untuk	terpenuhinya	anggaran untuk
mendukung capaian	mendukung capaian	anggaran untuk	capaian indicator
kinerja	sasaran strategis dengan	pelaksanaan	kinerja dan program
	penganggaran tepat	Gerakan/ Kampanye	
	guna	pangan B2SA ,	
		pelatihan pangan	
		lokal	
Tercukupinya sarana	Sarana dan prasarana	Perlunya sarana dan	Optimalisasi sarpras
dan prasarana untuk	belum optimal untuk	prasarana kerja yang	yang ada serta
mendukung kinerja	mendukung capaian	memadai untuk	penggunaan sarpras
	kinerja	membantu	tepat guna
		kelompok dalam	
		pengolahan pangan	
		lokal	
umber: Data diolah DVP 2022			

Sumber : Data diolah, DKP 2023



Sasaran kedua *Meningkatnya pola konsumsi* pangan masyarakat yang beragam,bergizi seimbang dan aman dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat serta Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Pada sasaran 2 ini termasuk kedalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 473.480.710,- dan realisasi sebesar Rp. 449.400.390,- atau 94,91%. Dan program Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran Rp. 68.830.650,- dan realisasi sebesar Rp. 65.317.040,- atau 94,89%. Serapan anggaran untuk sasaran ini cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai baik.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam,bergizi seimbang dan aman, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.25

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam,bergizi seimbang dan aman

						Kinerja						
No	Sasaran	Indik	ator	Satuan	Target	Realisa si	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam,bergizi seimbang dan aman	1.1	Skor PPH Konsumsi Tingkat Keamanan Pangan	% Level	85,10	87,3	102,58 100	2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan Keamanan	473.480.710 68.830.650	449.400.390 65.317.040	94,91
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR	· mgm				101,29	TOTAL PER	Pangan			
								SASARAN		542.311.360	514.717.430	94,91
					TII	NGKAT <u>EFI</u>	<u>SIENSI</u> 6,38%	%				
					TING	KAT <u>EFEKT</u>	IFITAS 106,7	<u>′2</u> %				

Sumber: DKP, 2023

Dari Tabel 3.25 diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 6,38%. Hal ini menunjukkan tingkat efiseinsi yang cukup tinggi dengan tingkat efektifitas sebesar 106,72%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki kinerja yang efektif dan efisien karena dengan pencapaian yang melebihi target dapat dilakukan efisinsi sebesar 6,38% dari anggaran yang direncanakan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam,bergizi seimbang dan aman** berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb:

- Melakukan pelatihan atau bimtek untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pengawas.
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan pangan.
- 3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam wadah jejaring keamanan pangan.
- 4. Menggiatkan sosialisasi dan promosi keamanan pangan secara berkesinambungan.

Sasaran 3 Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022		Capaia % Tahun 20		•	%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap
140			Target		Realisas i	Target	Realisasi			Refistra	akhir renstra (%)
1	Stabilitas Harga										
	* beras	%	≤10	2,95	170,5	≤10	3,93	160,7	Sangat baik	10	160,7
	* cabe	%	≤25	32,74	69,04	≤25	18,68	125,2 8	Sangat baik	25	125,28
	* bawang	%	≤25	16,64	133,4 4	≤25	15,87	136,5 2	Sangat baik	25	136,52
	Rata-rata Capaian Kinerja		≤10		118,8 9	≤10		140,8 3	Sangat baik		140,83

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Sasaran meningkatnya kelancaran distribusi pangan dilihat dari indikator : Stabilitas Harga Beras, Stabilitas Harga Cabe, dan Stabilitas Harga Bawangdengan rata-rata capaian kinerja 140,83% kategori sangat baik

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Beras adalah sebesar 3,93 % dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 160,7 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini sedikit mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Cabe adalah sebesar 18,68 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 125,28% dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator Stabilitas Harga Bawang adalah sebesar 15,87 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 136,52 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya.

Sasaran meningkatnya kelancaran distribusi pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga jatuh pada saat panen raya, dan harga melambung pada saat di luar panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan/stabilitas politik nasional. Pengalaman Tahun 1996 dan Tahun 1998 membuktikan bahwa terjadinya goncangan ekonomi yang kemudian berubah menjadi krisis politik, terjadi karena harga pangan melonjak drastis dalam jangka waktu yang pendek. Untuk menghindari terulangnya kejadian tersebut, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan stabilitas harga pangan yang komprehensif dan dapat merespon beberapa perubahan lingkungan strategis seperti dinamika ekonomi global dan perubahan sistem manajemen pemerintahan agar krisis ekonomi dan krisis politik tidak terulang kembali.

Koefisien Variasi (CV) merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda atau perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Dalam analisis harga koefisien variasi digunakan untuk mengetahui kestabilan harga. Dalam sistem distribusi dan harga pangan, bahwa harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 10% untuk beras dan dibawah 25% untuk cabe dan bawang . Apabila CV berada diatas 10% dan 25% maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen.

A. Indikator Pertama Stabilitas Harga

• Harga Beras



Gambaran gejolak harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27
Gambaran gejolak Harga Bahan Pangan Pokok dan Coefisien Variasi (CV) Tingkat
Konsumen Tahun 2023

No.	Bulan	Harga Rata-rata Beras KW I di					
		tingkat Konsumen					
1	Januari	14.957					
2	Februari	15.732					
3	Maret	15.321					
4	April	15.000					
5	Mei	15.457					
6	Juni	15.179					
7	Juli	15.000					
8	Agustus	15.107					
9	September	16.179					
10	Oktober	16.671					
11	Nopember	16.161					
12	Desember	16.000					
Rata-r	ata	15.563					
H-MA	X	16.671					
H-MIN		14.957					
CV		3,93					

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Beras telah mencapai target yaitu $CV \le 10\%$. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 harga beras Kualitas I dalam kondisi stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV 3,93%.

Untuk melihat pergerakan harga beras kualitas I dapat kita lihat lebih jelas lagi melalui grafik dibawah ini

17,000 16,671 16,500 16,161 16,179 16,000 15,732 16,000 15,457 15,321 15,500 15,000 15,107 14,957 15,000 15,000 14,500 14,000 Movember september Oktober April Mei Juri الدر ☐ Beras Kwalitas I

Gambar 3.2.
Perkembangan Harga Beras Kualitas I di Tingkat Konsumen

Sumber: DKP, 2023

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan harga beras kualitas I di tingkat konsumen berbanding lurus dengan harga di tingkat produsen. Harga tertinggi beras kualitas I di tingkat konsumen terjadi pada bulan Oktober dengan harga ratarata Rp. 16.671,-/kg. Pada bulan-bulan lainnya dibawah harga tersebut, dengan harga terendah terjadi pada bulan Januari pada rata-rata harga Rp.14.957,-/kg.

Harga beras mulai mengalami kenaikan dari bulan September dari harga Rp.15.107,-/kg dibulan Agustus naik menjadi Rp. 16.179 dan terus naik sampai puncaknya di bulan Oktober menjadi Rp. 16.671,-/kg. Bulan November harga beras kualitas I turun menjadi Rp. 16.161,-/kg dan turun lagi di bulan Desember menjadi rata-rata Rp. 16.000,-/kg.

Harga Cabe



Gambaran gejolak harga cabe di tingkat konsumen dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28

Gambaran gejolak Harga Cabe Merah dan Coefisien Variasi (CV) Tingkat Konsumen
Tahun 2023

No.	Bulan	Harga Rata-rata Cabe Merah di tingkat Konsumen				
1	Januari	39.943				
2	Februari	45.239				
3	Maret	36.614				
4	April	28.536				
5	Mei	22.371				
6	Juni	27.714				
7	Juli	35.057				
8	Agustus	45.357				
9	September	43.786				
10	Oktober	44.086				
11	Nopember	66.821				
12	Desember	55.643				
Rata-ra	ata	40.943				
H-MA	(66.821				
H-MIN		22.371				
CV		18,68				

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Cabe mencapai target yaitu $CV \le 25\%$. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 harga cabe dalam kondisi stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV 18,68%.

Gejolak harga juga terlihat dengan jelas. Pada bulan Januari, rata-rata harga cabe di tingkat konsumen berada pada angka rata-rata Rp. 39.943,-/kg, bulan Februari naik menjadi rata-rata Rp. 45.239,-/kg dan di bulan-bulan selanjutnya terus turun mencapai harga rata-rata Rp. 22.371,-/kg pada bulan Juni yang merupakan haga terendah komoditi cabe merah di tahun 2023.

Perkembangan harga cabe merah di tingkat konsumen dapat dilihat pada Gambar 3.3

70.000 66,821 55,643 60,000 45,357 43,786 44,086 45,239 50,000 39,943 36,614 35,057 40,000 27,714 28,536 30,000 22,371 20,000 10,000 Oktober November Juli Mei

Gambar 3.3.
Perkembangan Harga Cabe di Tingkat Konsumen

Sumber : DKP, 2023

Tingginya harga cabe ini disebabkan oleh:

- a. Faktor cuaca, dimana di daerah produsen cabe baik di dalam daerah Sumatera Barat maupun di luar daerah Sumatera Barat seperti Jawa dan Lampung mengalami bencana alam seperti banjir dan gunung meletus sehingga tanaman cabe banyak mengalami gagal panen.
- Meningkatnya biaya produksi dan kelangkaan pupuk serta tingginya harga racun dan pestisida

• Harga Bawang Merah



Gambaran gejolak harga bawang merah di tingkat konsumen dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29

Gambaran gejolak Harga Bawang Merah dan Coefisien Variasi (CV) Tingkat Konsumen
Tahun 2023

No.	Bulan	Harga Rata-rata Bawang Merah di tingkat Konsumen				
1	Januari	34.286				
2	Februari	32.039				
3	Maret	29.814				
4	April	27.857				
5	Mei	30.114				
6	Juni	32.107				
7	Juli	31.486				
8	Agustus	25.571				
9	September	19.786				
10	Oktober	21.886				
11	Nopember	29.214				
12	Desember	34.000				
Rata-ra	ata	29.013				
H-MA	ζ	34.286				
H-MIN		19.786				
CV		15,87				

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Bawang telah mencapai target yaitu CV ≤ 25%. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2023 harga bawang dalam stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV 15,87 %.

Kota Payakumbuh bukan sentra penghasil bawang merah, berangsur-angsur kota Payakumbuh mulai memproduksi bawang merah tapi masih dalam skala kecil dan belum mempengaruhi harga di pasaran. Bawang merah didatangkan oleh pedagang besar, baik dari dalam daerah Sumatera Barat berupa bawang lokal terutama bawang Solok dan pulau Jawa.

Kota Payakumbuh bukan sentra penghasil bawang merah, Kota Payakumbuh mulai memproduksi bawang merah tapi masih dalam skala kecil dan belum mempengaruhi harga di pasaran. Bawang merah didatangkan oleh pedagang besar, baik dari dalam daerah Sumatera Barat berupa bawang lokal terutama bawang Solok dan dari Brebes.

Bulan Januari harga bawang merah berada pada rata-rata Rp.34.286,-/kg, pada bulan Februari harga mulai turun sampai dengan bulan April yaitu mencapai harga rata-rata Rp. 27.857,-/kg. Bulan Mei harga kembali naik seiring dengan peningkatan permintaan menjadi rata-rata Rp.30.114,-/Kg, pada bulan Juni harga bawang merah kembali mengalami kenaikan menjadi rata-rata Rp. 32.107,-/Kg. Selanjutnya pada bulan Juli harga mulai turun dan terus turun sampai bulan September menjadi rata-rata Rp. 19.786,-/kg dan merupakan harga terendah komoditi bawang merah di Kota Payakumbuh pada tahun 2023, sedangkan harga tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan rata-rata harga Rp. 34.286,-/kg.

Perkembangan harga bawang merah di tingkat konsumen dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

40,000 34,286 34,000 32,107 31,486 35,000 32,039 29,814 30,114 29,214 27,857 30,000 25,571 25,000 21,886 19,786 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Bawang Merah

Gambar 3.4
Perkembangan Harga Bawang Merah di Tingkat Konsumen

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilitas Harga Beras, Cabe, Bawang Merah
 Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov.
 Sumatera Barat

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja Indikator Stabilitas Harga Beras, Cabe, Bawang Merah di Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat dapat kita lihat seperti pada Tabel 3.30 berikut :

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Stabilitas Harga Beras, Cabe, Bawang Merah
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov.
Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kota	Capaian Prov.Sumbar
		Payakumbuh	
1.	Stabilitas Harga		
	- Beras	3,93	5,67
	- Cabe	18,68	24,68
	- Bawang Merah	15,87	23,83

Sumber : Data diolah, DKP 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, capaian kinerja Stabilitas Harga Beras, Cabe dan Bawang Merah di Kota Payakumbuh sudah cukup stabil dibandingkan capaian tingkat Provinsi.

Sasaran ketiga *Meningkatnya kelancaran distribusi pangan* dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan yaitu, Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.091.002,- dan realisasi sebesar Rp. 122.176.575,- atau 95,28%. Serapan anggaran sebesar 92,49 % cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai sangat baik.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja stabilisasi harga bahan pangan utama ditingkat konsumen dengan capaian lebih dari 100 %. Capaian indikator kinerja stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen sangat baik. Adapun hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

- 1. Meningkatnya harga input/sarana produksi dan ketersediaan pangan setempat
- 2. Pengaruh faktor distribusi seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi, perilaku pedagang dalam menetapkan marjin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang
- Sepanjang tahun relatif kondisi angka surplus beras di Sumatera Barat tidak menjamin terhadap kondisi stabilitas ketersediaan dan harga karena sistim distribusi yang tidak merata serta akibat ulah pedagang yang memanfaatkan kondisi untuk meraih keuntungan.
- 4. Banyaknya cabe merah yang dipasok keluar Sumbar yang dibawa oleh pedagang, terutama ke Provinsi Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu dan Sumut, dan hal ini mengakibatkan sering terganggunya/kurangnya ketersediaan di daerah produksi.
- 5. Sistim distribusi yang efektif dan efisien untuk komoditi bahan pangan belum sepenuhnya dibenahi terutama oleh para pengambil kebijakan. Adanya mekanisme pasar yang tidak normal serta adanya pihak-pihak yang memainkan harga pangan di pasaran mengakibatkan gejolak harga pangan di masyarakat.

6. Salah satu penyebab distribusi bahan pangan di Kota Payakumbuh tidak bisa dipantau secara jelas adalah karena komoditi pangan masuk ke Payakumbuh tidak melalui pasar induk karena pasar induk di Payakumbuh tidak ada dan banyaknya pintu pasar lainnya yang bisa dimasuki oleh komoditi pangan dari daerah lainnya.

Faktor pendukung:

- 1. Koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
- 2. Monitoring harga dan pasokan yang dilakukan secara kontiniu.

• Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan dengan indikator kinerja Stabilitas Harga Beras, Cabe dan Bawang Merah, diperlukan Sumber daya yang memadai, mencakup:

- 1. Sumberdaya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
- 2. Sumber anggaran yang memadai.
- 3. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 3.31
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebih	Tindak Lanjut
		an	
Jumlah SDM sesuai	Jumlah SDM yang	Masih diperlukan	Mengisi kekurangan
persyaratan jabatan	mendukung kinerja	penambahan SDM	jabatan yang ada
dalam	belum cukup memadai	yang mempunyai	dengan mengangkat
mendukung	(1orang eselon 3, 1	kompetensi kelas	tenaga teknis yang

peningkatan	orang	jabatan serta	kompeten agar
ketahanan pangan	Analis Ketahanan	persyaratan jabatan	sasaran strategis
(6 orang Analis	Pangan dan 2 orang	yang sesuai	dapat optimal
Ketahanan Pangan	stafpada Bidang		dicapai
dan 3 orang Analis	Ketersediaan dan		
Pasar Hasil Pertanian	Cadangan Pangan)		
serta pada Bidang			
Distribusi dan			
Cadangan Pangan 1			
orang eselon 3 dan			
5 orang Staf			
Sumber anggaran	Anggaran yang ada saat	Masih dibutuhkan	Penambahan
yang dapat	ini dioptimalkan untuk	penambahan	anggaran
mendukung capaian	mendukung capaian	anggaran untuk	
kinerja	sasaran strategis dengan	pencapaian kinerja	
	penganggaran tepat		
	guna		
Tercukupinya sarana	Belum terpenuhinya	Perlunya sarana dan	Pemenuhan
dan prasarana untuk	sarana prasarana yang	prasarana kerja yang	kebutuhan sarana
mendukung kinerja	dibutuhkan untuk	memadai untuk	prasarana
	mendukung capaian	membantu	
	kinerja	pemantauan harga,	
		stok dan pasokan	

Sumber : Data diolah, DKP 2023

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.32
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan

						Kinerja				Keuangan		
No	Sasaran		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan	1.1	Stabilitas Harga Beras	%	10	3,93	160,7		Program			
		1.2	Stabilitas Harga Cabe	%	25	18,68	125,28		Peningkatan Diversifikasi			
		1.3 Stabilitas Harga 8 25 15,87 136,52 1	1	dan Ketahanan Pangan Masyarakat	132.091.002	122.176.575	92,49					
		RATA- RATA CAPAIA N DARI 3 INDIKA TOR					140,83	TOTAL PER SASAR AN		132.091.002	122.176.575	92,49
						EFISIENSI 48						
				TI	NGKAT <u>EF</u>	EKTIFITAS 1	52,26%					

Sumber : Data diolah, DKP 2023

Dari Tabel 3.32 diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 48,34%, sedangkan tingkat efektifitas 152,26%. Hal ini menunjukkan tingkat efiseinsi yang sangat tinggi dengan tingkat efektifitas sebesar 152,26%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki kinerja yang efektif dan efisien karena dengan pencapaian yang melebihi target dapat dilakukan efisinsi sebesar 48,34% dari anggaran yang direncanakan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran *Meningkatkan Kelancaran Distribusi Pangan* berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb:

- Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
- 2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.
- 3. Melakukan monitoring harga dan pasokan secara kontiniu dan up date.

Sasaran 4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.33
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satua	Capaian Tahun 2022		%	Capaian Tahun 2023		%	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2023 terhadap akhir renstra	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			(%)	
1.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	Nilai	А	A	100	A	В	86,37	Α	86,37	
	Rata-rata Capaian Kinerja				100			86,37		86,37	

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilihat dari indikator: Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat. Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat adalah sebesar B dari target A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 86,37 % dengan kategori baik. Capaian ini menurun dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Tahun 2023 jika dibandingkan capaian target akhir pada Renstra dan RPJMD masih sebesar 86,37% (masih kurang 13,63%). Artinya masih banyak proses perbaikan yang terus menerus (continual improvement process) pada sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diinisiasi secara bersama-sama oleh Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat. Artinya untuk mendapatkan nilai A di akhir target Renstra/ RPJMD diperlukan komitmen dan kerja keras dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan spemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai 69,10 dengan kategori B untuk penyempurnaan dokumen yang akan datang perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- Agar Dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan di website unit kerja/pemerintah daerah
- 2. Agar target rencana aksi serta laporan capaian target di dalam rencana aksi untuk diisi sepenuhnya supaya kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

- Agar dibuat modul/pedoman teknis tentang pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- Agar dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang untuk dilaporkan secara berkala yang akan menjadi bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi di level organisasi
- 5. Agar dilakukan evaluasi capaian kinerja pegawai sebagai dasar pengaturan penempatan pegawai
- 6. Agar menyusun dokumen yang menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 7. Agar dokumen hasil monitoring dan evaluasi menjelaskan informai realisasi kinerja yang tidak mencapai target kinerja, factor hambatan dan solusi atau rekomendasi perbaikan dimana perubahan atau penyesuaian strategi kinerja itu diperlukan.
- 8. Agar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang juga memberikan informasi efisiensi anggaran berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan.
- 9. Agar menyusun laporan Monev Triwulan memberikan informasi factor pendukung, factor penghambat dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja t=yang tidak mencapai target di setiap triwulan.
- 10. Agar Dokumen Laporan KInerja dipublikasikan di website unit kerja/pemerintah daerah seiring waktu pengunggahan ke website esr-menpan.go.id
- 11. Agar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang juga memberikan informasi mengenai (1) perbandingan realisasi kinerja dengan level diatasnya (2) penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi (3) perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit seperti (1) menurunnya angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai dan (b) selalu memberikan rekomendasi jika terdapat kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovatif/adaptif.

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Dinas
 Ketahanan Pangan oleh Inspektorat Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan
 Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja Indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat di Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat dapat kita lihat seperti pada Tabel 3.34 berikut :

Tabel 3. 34
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan Capaian Kinerja Dinas Pangan Prov.
Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kota Payakumbuh	Capaian Prov.Sumbar
1.	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	В	ВВ

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, capaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat di Kota Payakumbuh masih rendah dibandingkan capaian tingkat Provinsi.

Sasaran keempat *Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah* masuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan yaitu, Perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.628.409.882,- dan realisasi sebesar Rp. 2.237.672.191,- atau 85,13%. Serapan anggaran sebesar 85,13% cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai sangat baik.

• Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat nilai 69,10 (B) dengan tingkat capaian 86,37%.

Adapun hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

- Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga melahirkan penilaian dan pandangan yang berbeda-beda.
- 2. Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih beriorientasi output, bukan outcome)

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan tata kelola organisasi adalah:

- Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
- 2. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
- 4. Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja danmemastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
- Sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, terukur dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan guna peningkatan kinerja Dinas.
- Dilakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing individu dan diberikan reward bagi individu yang baik hasil kinerjanya sebalikya pemberian punishment terhadap individu yang hasil kinerjanya kurang baik

• Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

- Sumberdaya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
- 2. Sumber anggaran yang memadai.
- 3. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 3.35
Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebih	Tindak Lanjut
		an	
Jumlah SDM yang	Jumlah SDM yang	Masih diperlukan	Mengisi kekurangan
kompeten dalam	mendukung kinerja	penambahan SDM	jabatan yang ada
pelaksanaan Sistem	belum cukup memadai	yang mempunyai	dengan mengangkat
AKIP (48 orang)	(SDM Dinas Ketahanan	kompetensi kelas	tenaga teknis yang
	Pangan 15 orang)	jabatan serta	kompeten agar
		persyaratan jabatan	sasaran strategis
		yang sesuai	dapat optimal
			dicapai
Sumber anggaran	Anggaran yang ada saat	Anggaran belum	Optimalisasi
yang dapat	ini dapat dioptimalkan	dapat memenuhi	anggaran untuk
mendukung capaian	untuk mendukung	secara optimal dalam	capaian indicator
kinerja	capaian sasaran	pencapaian kinerja di	kinerja dan program
	strategis dengan	Dinas	
	penganggaran tepat		
	guna		

Tercukupinya sarana	Sarana dan prasarana	Perlunya sarana dan	Optimalisasi sarpras
dan prasarana untuk	belum optimal untuk	prasarana kerja yang	yang ada serta
mendukung kinerja	mendukung capaian	memadai untuk	penggunaan sarpras
	kinerja	perencanaan dan	tepat guna
		pelaporan	

Sumber : Data diolah, DKP 2023

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.36
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

						Kinerja				Keuangan		
No	Sasaran	Inc	dikator	Satuan	Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Δ	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	В	86,37	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.628.409.882	2.237.672.191	85,13
		RATA - RATA CAPA IAN DARI					86,37	TOT AL PER SAS AR AN		2.628.409.882	2.237.672.191	85,13
	TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 1,24%											
					TINGKAT	EFEKTIFITAS	101,45%	Š				
	Sumbar Data				TINGKAT	EFEKTIFITAS	101,45%)				

Sumber : Data diolah, DKP 2023

Dari Tabel 3.36 diatas dapat dijelaskan, tingkat efisiensi berada pada nilai 1,24%, sedangkan tingkat efektifitas 101,45%. Hal ini menunjukkan tingkat efiseinsi yang cukup dengan efektif sebesar 101,45%. Angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan memiliki kinerja yang efektif dan efisien.

B. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.636.163.734,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.201.892.844,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,06%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan *Sangat Baik* .

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Sasaran Renstra Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2023

No.	Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya ketersediaan pangan		262.337.640	258.959.328	98,71
		Kegiatan Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	64.487.400	64.301.068	99,71
		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	182.683.840	179.795.870	98,41
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.166.400	14.862.390	98,00
2	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman		672.975.512	662.433.390	98,43
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	408.447.060	390.410.480	95,58

		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/kota	68.830.650	65.317.040	94,89
3.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan				
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	132.091.002	122.176.575	92,49
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		2.628.409.882	2.237.672.191	85,13
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22.385.450	21.376.800	95,49
		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.084.297.088	1.716.697.208	82,36
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.695.080	13.689.000	99,95
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.388.500	251.755.729	97,05
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.721.600	68.893.000	88,64

	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.722.164	61.648.231	99,88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah	109.200.000	103.612.223	94,88
Jumlah		3.636.163.734	3.201.892.844	88,06

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada Tahun 2023.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.38
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota
Payakumbuh Tahun 2023

No.	Kategori	Jumlah			n
		Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1,	1		258.959.328	98,71
1	Melebihi/Melampaui Target	1	114,83%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
В.	Sasaran 2,	2		514.717.430	94,91

1	Melebihi/Melampaui Target	1	102,58%		
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
C.	Sasaran 3,	4		122.176.575	92,49
1	Melebihi/Melampaui Target	3	140,83		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	1	-		
D.	Sasaran 4	1		2.237.672.191	85,13
1	Melebihi/Melampaui Target	-			
2	Sesuai Target	1	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	86,37%		

Sumber: Data diolah, DKP 2023

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

C. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Juara I Tingkat Provinsi	Penghargaan Adhikarya Pangan	2022
	Sumatera Barat,	Nusantara Tk. Prov Sumbar	
		Kategori Pelaku Pembangunan	
		Ketahanan Pangan kepada KWT	
		SEJAHTERA	





BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LkjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LkjIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023 ini dapat mengggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114,83 % atau interpretasi sangat baik Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 140,83 % atau interpretasi sangat baik Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 140,83 % atau interpretasi sangat baik Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 86,37% atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh TA 2023 sebesar Rp. **3.636.163.734**,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **3.201.892.844**,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,06%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan *Sangat Baik*.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.636.163.734,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan adalah 88,06 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

4.2 Hambatan / Kendala

Hambatan / kendala yang dihadapi Tahun 2023 dalam pencapian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah :

- Masih kurang nya ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh faktor produksi dan distribusi (ekspor-impor) dan produksi saat ini sangat dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, kelancaran air (perbaikan irigasi) dan hama yang dialami.
- 2. Msih belum idealnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat disebabkan kebiasaan pola makan masyarakat yang belum beragam dan berimbang.
- 3. Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

- 4. Pemanfaatan pangan lokal di Kota Payakumbuh masih dominan sebagai makanan pendamping, belum bisa sebagai subtitusi pangan / makanan pengganti pokok berupa beras dan terigu.
- 5. Belum berkembangnya industry pangan local di Kota Payakumbuh
- 6. Meningkatnya harga input/sarana produksi dan ketersediaan pangan setempat
- 7. Pengaruh faktor distribusi seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi, perilaku pedagang dalam menetapkan marjin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang
- 8. Sepanjang tahun relatif kondisi angka surplus beras di Sumatera Barat tidak menjamin terhadap kondisi stabilitas ketersediaan dan harga karena sistim distribusi yang tidak merata serta akibat ulah pedagang yang memanfaatkan kondisi untuk meraih keuntungan.
- 9. Banyaknya cabe merah yang dipasok keluar Sumbar yang dibawa oleh pedagang, terutama ke Provinsi Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu dan Sumut, dan hal ini mengakibatkan sering terganggunya/kurangnya ketersediaan di daerah produksi.
- 10. Sistim distribusi yang efektif dan efisien untuk komoditi bahan pangan belum sepenuhnya dibenahi terutama oleh para pengambil kebijakan. Adanya mekanisme pasar yang tidak normal serta adanya pihak-pihak yang memainkan harga pangan di pasaran mengakibatkan gejolak harga pangan di masyarakat.

4.3 Rekomendasi

Langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya antara lain:

- Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
- Melakukan evaluasi time schedule kegiatan sehingga lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan sesuai kondisi yang ada
- 3. Perlu adanya Gerakan/Kampanye Diversifikasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam melaksanakan edukasi / sosialisasi ke masyarakat.

4. Sangat diperlukan pengembangan SDM pelaku usaha pengolahan pangan lokal dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan manajemen usaha, kewirusahaan dan strategi bisnis pengolahan pangan lokal

 Hasil olahan pangan lokal yang ada di kelompok binaan/UKM sebaiknya dipromosikan melalui event pameran atau pada acara kedinasan sebaiknya menu/snack yang disediakan adalah pangan local

 Jaringan usaha pengolahan pangan lokal yang melibatkan stakeholder dan off taker terkait harus ditingkatkan untuk memudahkan pelaku usaha pangan lokal dalam manajemen usaha, suplai bahan baku, promosi dan pemasaran maupun akses terhadap permodalan

7. Koordinasi lintas sektor yang semakin baik.

8. Monitoring harga dan pasokan yang dilakukan secara kontiniu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH

> DINAS KETAHANAN PAN

EDVIDEL ARDA, S.IP NIP. 19700124 199003 1 001